

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MANDIRI



**Analisis Potensi Dan Pemanfaatan Lahan APL dan HGU
Dalam Pengembangan Investasi
Di Provinsi Gorontalo**

Oleh:

Dr. Faachrudin Zain Olilingo,SE.,MSi NIDN 0028105805

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TAHUN 2014

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN MANDIRI**

Judul Kegiatan : Analisis Potensi Dan Pemanfaatan Lahan API dan HGU Dalam Pengembangan Investasi

KETUA PENELITI

A. Nama Lengkap : Dr. Fachrudin Zain Ollilingo, M.Si
B. NIDN : 00281058005
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi
E. Nomor HP : 081244200234
F. Email : gelatik55b@yahoo.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 bulan
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 5.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan :
- Diusulkan Ke Lembaga : Rp 5.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



(Dr. Hamzah Yunus, M.Pd)
NIP/NIK. 196002231986031004

Gorontalo, 15 Januari 2015
Ketua Peneliti,



(Dr. Fachrudin Zain Ollilingo, M.Si)
NIP/NIK. 195810281986031003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd)
NIP/NIK. 196111141987031002

Abstrak

Penelitian ini hendak mengungkap potensi investasi dan pemanfaatan lahan Area Penggunaan Lain (APL) serta lahan Hak Guna Usaha (HGU) dalam kaitannya dengan pengembangan investasi di Gorontalo. Penelitian ini cukup penting dilakukan karena Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang masih relative muda dan memiliki potensi yang beragam namun belum terolah secara maksimal, sehingga hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi calon investor juga bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang pro investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu yang yang seringkali dikeluhkan para investor apabila berkunjung ke daerah Gorontalo adalah belum tersedianya informasi lahan yang akurat dan feasible untuk kegiatan investasi. Di lapangan sering dijumpai adanya tanah terlantar walaupun sudah dikeluarkan izin pemanfaatannya atau ada izin pemakaian lahan yang tumpang tindih, atau informasi lahan tidak sesuai peruntukannya untuk investasi dll.

Untuk itu perlu dilakukan studi potensi sumberdaya lahan untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk dikembangkan pada suatu bentang lahan. Selain itu untuk mengantisipasi persaingan yang kurang sehat dalam merebut pasar dan menghindari terjadinya *over product* suatu komoditi tertentu, maka sangat perlu dilakukan analisis pemanfaatan lahan sebagai salah satu bentuk informasi kepada para investor, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan tentang sebaran data tanpa mengungkapkan hubungan data serta pengaruh antar variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih memiliki peluang investasi utamanya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan. Tanah APL di Provinsi Gorontalo seluas 429.568 ha dan saat ini masih tersedia sekitar 48.386 ha yang tersebar di Provinsi Gorontalo yang saat ini masih semak belukar yang merupakan potensi investasi. Untuk tanah HGU di Provinsi Gorontalo seluas 240.913,88 ha sebahagian besar sudah dimanfaatkan oleh 12 perusahaan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, tebu dan kelapa dalam. Namun demikian pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan terhadap izin yang sudah dikeluarkan tapi tidak aktif hendaknya dicabut dan diberikan kepada yang serius untuk berinvestasi.

Kata Kunci Penelitian Potensi Investasi.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Akhir penelitian yang berjudul “ Analisis Potensi dan Pemanfaatan Lahan APL dan HGU dalam pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi investasi di Provinsi Gorontalo serta pemanfaatan lahan APL dan HGU yang diharapkan dapat bermanfaat bagi calon investor untuk perencanaan investasi serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengeluarkan kebijakan pengembangan investasi di Gorontalo.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan saran yang konstruktif guna tercapainya hasil penelitian ini.

Gorontalo, 24 Desember 2014

Penulis

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
Bab II Tinjauan Pustaka.....	6
2.1 Konsep Region Atau Wilayah	6
2.2 Konsep Wilayah Dalam Pengembangan Ekonomi	8
2.3 Peran Investasi dalam pengembangan wilayah	11
2.3.1 Kondisi Ekonomi	11
2.3.2 Perkembangan Investasi	12
2.3.3 Investasi Asing (PMA)	12
2.3.4 Investasi Dalam Negeri (PMDN)	13
Bab III. Metodologi Penelitian	14
3.1 Objek Penelitian	14
3.2 Lokasi Penelitian	14
3.3 Jenis Dan Sumber Data	15
3.4 Metode Analisis	15
Bab IV. Hasil Dan Pembahasan	17
4.1 Kondisi Wilayah	17
4.1.1 Luas Wilayah	17
4.1.2 Topografi	18
4.1.3 Geologi	20

4.2	Pertumbuhan Ekonomi	23
4.3	Kependudukan	24
4.3.1	Jumlah Penduduk	24
4.3.2	Pertumbuhan Penduduk	25
4.3.3	Tenaga Kerja	26
4.3.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	26
4.4	Pemerintahan	28
4.4.1	Administrasi Wilayah	28
4.4.2	Aparat Pemerintah	29
4.4.3	Partai Politik	29
4.5	Potensi Sumber Daya Alam	30
4.5.1	Potensi Pertanian	30
4.5.2	Potensi Perikanan	35
4.5.3	Potensi Kehutanan	40
4.5.4	Potensi Pertambangan Dan Energi	42
4.5.5	Kondisi Wilayah Areal Penggunaan Lain	45
4.5.6	Kondisi Wilayah Hak Guna Usaha (HGU)	55
4.5.7	Pemanfaatan APL dan HGU untuk Perkebunan	66
4.5.8	Pemanfaatan kawasan wisata	71
4.5.9	Pemanfatan sumber energi terbarukan	72
4.5.10	Izin Usaha Pertambangan	74
Bab V.	Penutup	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran-Saran	77
	Daftar Pustaka	79
	Lampiran	80

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo	20
Tabel 2.. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2006-2010	24
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio,2010	25
Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo	26
Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut jenis kegiatan utama	27
Tabel 6. Jumlah kecamatan dan desa di Provinsi Gorontalo	28
Tabel 7. Dasar hukum pembentukan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo	29
Tabel 8. Perbandingan NTP per sektor Januari-Februari 2012	35
Tabel 9. Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Kg/kapita/tahun)	36
Tabel 10. Jumlah Kelompok Pembudidaya dan Jumlah Nelayan Penerima Bantuan	37
Tabel 11. Produksi Perikanan	37
Tabel 12. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo	40
Tabel 13. Kawasan hutan yang berhutan dan tidak berhutan berdasarkan fungsinya.....	41
Tabel 14. Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	42
Tabel 15. Jenis Mineral dan besaran volume	43
Tabel 16. Luas APL setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo	45
Tabel 17. Kelas lereng	47
Tabel 18. Tingkat kelerengan di wilayah APL.....	47
Tabel 19. Tipe Tutupan Lahan Hutan di APL	51
Tabel 20. Tipe iklim diwilayah APL	52
Tabel 21. Luas dan Jenis Tanah di APL	53
Tabel 22. Luas dan sebaran HGU di Provinsi Gorontalo	58
Tabel 23. Klasifikasi iklim di HGU Provinsi Gorontalo	60
Tabel 24. Kelas Lereng HGU setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo	61
Tabel 25. Luas Tutupan Lahan Setiap Kabupaten di HGU Provinsi Gorontalo.....	62
Tabel 26. Jenis Tanah setiap Kabupaten di HGU Provinsi Gorontalo	64
Tabel 27. Komposisi Vegetasi budidaya di lokasi HGU	65
Tabel 28. Nama-nama perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Gorontalo	67
Tabel 29. Luas perkebunan tebu	69

Tabel 30. Pemilik HGU Individu di Kabupaten Gorontalo Utara	70
Tabel 31. Pemilik HGU di Kabupaten Bone Bolango	70
Tabel 32. Pemilik HGU individu di Kabupaten Pohuwato	71
Tabel 33. Pemilik HGU individu di Kabupaten Boalemo	71
Tabel 34. Nama perusahaan pemegang IUP dan Kontrak Karya di Provinsi Gorontalo	75

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan instrument penting dalam perekonomian sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi terbentuknya Produk Domestik Bruto selain dipengaruhi oleh sector konsumsi, ekspor dan impor juga tak kalah pentingnya juga dipengaruhi oleh investasi sebagai komponen penting dalam keseimbangan ekonomi. Peran investasi tersebut bila dikaitkan dengan kemampuan mengolah sumber daya alam, maka akan diperhadapkan dengan synthesa kebutuhan modal dan teknologi yang cenderung kurang dimiliki oleh Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti Indonesia. Dalam menghadapi fenomena ini maka thesis yang selalu dikeluarkan adalah seperangkat kebijakan yang selalu bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi ke dalam negeri. Tentunya di tengah kondisi perekonomian yang semakin terbuka dan penuh persaingan, maka berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan senantiasa akan berhadapan dengan ragam kebijakan yang dikeluarkan juga oleh Negara-negara lain yang juga bertujuan membuka kran investasi di negaranya misalnya kebijakan keringanan pajak, dukungan keamanan, percepatan dan kepastian perizinan, tenaga kerja yang murah, dukungan pemerintah dan masyarakat, tersedianya informasi penyediaan lahan yang akurat dan feasible.

Dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih positif Indonesia menikmati arus investasi seperti yang dirilis oleh United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa dari aspek akumulasi investasi Indonesia menempati peringkat ke 25 dari 238 negara pada tahun 2011. Porsi investasi asing di

Indonesia tercatat sebesar 0,84 % terhadap total investasi dunia, meski masih di bawah Singapura (2,54 %), di Kawasan ASEAN Indonesia sudah mengungguli Negara-negara tetangga lain seperti Thailand, Malaysia dan Philipina.

Secara umum, Negara-negara berkembang mengalami peningkatan share akumulasi investasi. Pada saat yang sama Negara-negara maju mengalami penurunan. Amerika Serikat misalnya yang pada akhir decade akhir 1990an sempat mencatat share investasi asing hampir 40%, pada tahun 2011 jumlah tersebut turun menjadi hampir 17,17 %. Dengan kondisi prospek ekonomi beberapa Negara di Eropa yang masih belum menentu, tren arus investasi seperti di atas kemungkinan masih akan berlanjut.

Semenjak Provinsi Gorontalo terbentuk 16 Pebruari 2001 telah terjadi perkembangan investasi yang cukup signifikan baik PMA maupun PMDN, dimana sampai dengan tahun 2013 jumlah PMA sebanyak 10 perusahaan dengan total investasi 1.63 triliun rupiah dan PMDN sebanyak 3 perusahaan dengan total investasi 664.3 milyar rupiah. Keberadaan investasi di daerah ini sangat dirasakan berdampak pada akselerasi kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih cukup menjanjikan diberbagai bidang seperti Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Kehutanan, Perindustrian dan Pertambangan. Untuk itu upaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki terus dilakukan dengan menyediakan pelayanan prima kepada calon investor seperti dukungan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu, pembentukan Tim Task Force yang akan membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi perusahaan, menyediakan informasi data potensi investasi di Provinsi Gorontalo.

Salah satu yang dikeluhkan para investor apabila berkunjung ke daerah Gorontalo adalah belum tersedianya informasi lahan yang akurat dan feasible untuk kegiatan investasi. Di lapangan sering dijumpai adanya tanah terlantar walaupun sudah dikeluarkan izin pemanfaatannya atau ada izin pemakaian lahan yang tumpang tindih, atau informasi lahan tidak sesuai peruntukannya untuk investasi dll.

Untuk itu perlu dilakukan studi potensi sumberdaya lahan untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk dikembangkan pada suatu bentang lahan. Selain itu untuk mengantisipasi persaingan yang kurang sehat dalam merebut pasar dan menghindari terjadinya *over product* suatu komoditi tertentu, maka sangat perlu dilakukan analisis pemanfaatan lahan sebagai salah satu bentuk informasi kepada para investor, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Analisis ini dilakukan sebagai upaya untuk menemu-kenali kawasan yang potensial dan prospektif serta pemanfaatannya, serta upaya-upaya pembangunan yang dapat mendukung pengembangannya, agar pemerintah daerah lebih mudah mengambil kebijakan pembangunan strategis. Lebih jauh lagi kegiatan ini adalah upaya terprogram sebagai strategi dalam pembangunan daerah dengan pendekatan wilayah, guna memacu kegiatan ekonomi yang berbasis kemampuan lokal agar menjadi potensi SDA nasional dan internasional

Pengelolaan potensi sumber daya alam daerah harus mampu meningkatkan peluang daerah untuk dijadikan target dan tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum menggambarkan kondisi geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Ketersediaan data dan informasi tentang potensi daerah dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah.

Analisis pemanfaatan lahan juga diharapkan dapat membantu para calon investor menilai arah kebijakan pemerintah sehingga memberikan kesan tentang kepastian hukum dan berusaha di Provinsi Gorontalo sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan investasinya. memilih dan memutuskan minat investasinya, Kajian potensi investasi daerah serta analisa pemanfaatan lahan dilakukan dengan menampung aspirasi dan permintaan Pemerintah Daerah terkait dengan potensi investasi serta memperhatikan arahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dari setiap sektor atau kementerian yang terkait dengan investasi daerah.

Kajian ini diarahkan pada pengkajian pemanfaatan lahan khususnya lahan HGU dan APL yang cukup luas terbentang di Provinsi Gorontalo dan seringkali menjadi issue yang cukup kontroversial di masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang hendak diungkap dalam penelitian ini adalah:

- a. Potensi apa saja yang menjadi unggulan dalam menunjang pengembangan ekonomi di Provinsi Gorontalo
- b. Sejauhmana pemanfaatan lahan HGU dan APL dalam pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui potensi unggulan dalam pengembangan investasi untuk menunjang pengembangan ekonomi di Provinsi Gorontalo
- b. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan lahan HGU dan APL dalam pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi tentang potensi unggulan di Provinsi Gorontalo sehingga memberikan kemudahan kepada calon investor untuk merencanakan investasinya juga kepada pemerintah daerah dalam merencanakan promosi investasi
- b. Memberikan kepastian terhadap pemanfaatan lahan HGU dan APL sehingga menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya baik oleh Investor, Pemerintah Daerah, maupun berbagai kalangan pemangku kepentingan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Region Atau Wilayah

Pendefinisian suatu wilayah bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Apakah pendefinisian suatu wilayah akan dilakukan berdasarkan kesatuan daerah ekonomi, daerah administrative, maupun berdasarkan kesatuan yang telah bersifat historis, samapai saat ini belum dapat dianggap sebagai criteria yang memuaskan.

Pengertian region yang digunakan dalam Ekonomi Regional adalah sangat luas, sepanjang di dalamnya terkandung unsure tempat atau “space” . Itulah sebabnya Teori Ekonomi Regional sering pula dinamakan “Spatial Economic Theory” atau “Space Economics”. Region dalam hal ini dapat berarti Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, maupun suatu kelompok Negara seperti ASEAN. Disamping itu region dapat pula berarti sekelompok daerah atau Provinsi yang mempunyai cirri-ciri dan keadaan yang sama yang dapat pula berarti sekelompok daerah atau Provinsi yang mempunyai ciri-ciri dan keadaan yang sama yang dianalisa dan dibandingkan dengan sekelompok daerah lain yang berbeda. Sebagai contoh di Indonesia yang membagi daerahnya atas dua wilayah yaitu: Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau Wilayah Jawa dan Luar Jawa. Pada analisis yang bersifat mikro, region dapat diartikan sebagai interaksi antara sumber bahan dengan pasar (Weberian Analysis) atau suatu daerah pemasaran dimana permintaan terkumpul (Loshian Approach). Bahkan interaksi antara pinggiran kota (Sub Urban) dengan pusat kota (Businiss District) yang tercakup dalam analisa regional.

Dalam hal yang dimaksud dengan Pembangunan Wilayah (Regional Development) pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu regional yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan social region tersebut serta menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku (andy, 1982). Oleh karena itu istilah region ini merupakan hal yang penting untuk didefinisikan secara tegas, terutama dalam menganalisis kegiatan ekonomi di dalam region tersebut.

Menurut Ferrox (1950), wilayah adalah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi criteria-kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara uniternal. Selanjutnya ia membedakan wilayah atas wilayah homogeny (Homogeneous Region), Wilayah Nodal (Nodal atau Polorized Region), Wilayah Perencanaan dan Wilayah Administratif (Planning Region). Konsep wilayah ini lazim digunakan dalam analisis Ekonomi Regional.

- a. Konsep *Homogeneous Region* yang didefinisikan Homogeneous Region yang didefinisikan atas kesamaan karakteristik beberapa daerah. Karakteristik yang dimaksudkan disini dapat berupa pendapatan per kapita, jenis produksi utama, problem social, tingkat industrialisasi, dan lain-lainnya.
- b. Konsep *Nodal (Polorized) Region* yang lebih banyak diterapkan dengan memperhatikan tingkat keterkaitan antar masing-masing daerah. Tingkat keterkaitan tersebut biasanya diukur berdasarkan atas arus lalu lintas barang, penduduk maupun modal.
- c. Konsep *Planning Region* dimana pengelompokkan lebih banyak didasarkan atas kesatuan politik atau kesatuan administrasi. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota yang bersifat otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi (UU Np. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Walaupun secara teoritis ketiga pengelompokan wilayah tersebut dapat dilakukan, namun dalam praktek, kompromi atau penggabungan sering pula dilakukan. Kebijakan tersebut penting artinya untuk menjamin penerapan konsep wilayah dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya dengan konsep wilayah yang diterapkan pada Departemen PU dan Deperindag yang pada dasarnya menganut konsep nodal region, yaitu ditentukan berdasarkan jaringan transportasi dan keterkaitan antar industry, dalam beberapa hal masih tetap melakukan kompromi guna dapat terus menjaga kesatuan daerah administrasi seperti Provinsi. Dari uraian ini terlihat bahwa penerapan konsep wilayah secara murni jarang dapat dilakukan dalam praktek.

2.2 Konsep Wilayah Dalam Pengembangan Ekonomi

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 1970 an telah memperkenalkan konsep pembangunan wilayah melalui strategi perwilayahan pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan. Konsep tersebut bertujuan selain mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang dapat mendorong terjadinya efek penyebaran (*spread effects*) pembangunan dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah penyangga (*hinterland*). Konsep pusat pertumbuhan atau pusat pengembangan (*growth poles*) dapat melakukan penggabungan antara prinsip-prinsip “konsentrasi” dengan “desntralisasi” secara sekaligus (Alonso, 1968). Dengan demikian teori ini diharapkan sebagai salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Menurut Perroux, konsep *poles de croissance* lebih banyak menyangkut dengan konsep *economic region* daripada *geographic region*. Karena itu suatu pusat pengembangan seringkali didefinisikan sebagai suatu pusat konsentrasi industry pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling melalui hubungan input dan output dengan industry utama (*propulsive*

industry). Konsentrasi dan saling keterkaitan merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui factor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk *agglomeration economies* yang dapat menunjang pertumbuhan industry-industri tersebut melalui penurunan ongkos produksi.

Secara lebih jelas Darwent (1975) mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai perusahaan-perusahaan atau industry-industri dimana pertumbuhan atau perubahan akan dimulai dari kelompok perusahaan tersebut, sedangkan hubungan-hubungan diantara kutub-kutub tersebut dalam hal masukan dan hasil merupakan media perpindahan kekuatan-kekuatan yang dihasilkan oleh kutub-kutub pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hirschman (1958) yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi di berbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila di suatu wilayah terjadi pembangunan, maka akan terjadi daya tarik yang kuat, yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar wilayah di mana pembangunan tersebut bermula. Selanjutnya North (1970) menyatakan bahwa “ Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah terjadi karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*) dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan ke luar wilayah. Besarnya kekuatan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, ditunjukkan oleh koefisien pengganda yang dihasilkannya. Menurut teori ini sector ekspor penting sekali peranannya dalam pembangunan daerah karena a). Secara langsung menciptakan kenaikan pendapatan factor-faktor produksi daerah; b). Menciptakan permintaan akan produksi local. Kegiatan ekspor memungkinkan suatu daerah untuk mengimpor barang-barang modal yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan ekonomi, memperluas pasar, meningkatkan produksi, mendorong peningkatan investasi dan lain sebagainya. Sejuahmana upaya pusat pertumbuhan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan

industry ditentukan oleh sasaran yang ingin dicapai. Menurut Richardson (1978) bila kegiatan ekonomi (industry) yang saling berkaitan dikonsentrasikan pada suatu tempat tertentu, maka pertumbuhan ekonomi dari daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan lebih cepat bila dibandingkan kalau industry tersebut dan terpecah ke seluruh pelosok daerah. Sejalan dengan itu Marsudi Djoyodipuro (1992) menyatakan bila sasarannya untuk mencapai peningkatan produksi domestic regional bruto atau pertumbuhan ekonomi yang optimum, maka konsentrasi investasi di beberapa lokasi yang terpilih jadi pusat pertumbuhan akan lebih efektif daripada investasi yang merata, karena lokasi-lokasi tersebut lebih baik daripada merata. Di samping itu penghematan ekstern (*external economies*) akan lebih mudah terjadi pada investasi yang terkonsentrasi pada suatu tempat daripada yang tersebar. Penentuan lokasi investasi yang dapat diharapkan akan berperan sebagai pusat pertumbuhan dalam suatu daerah mencakup penemuan tempat dimana industry tertentu yang searah dengan keuntungan komparatif daerah yang bersangkutan dapat beroperasi secara menguntungkan, yang pada gilirannya dapat memacu daerah sekitarnya secara optimal.

Selanjutnya *export base models* yang dipelopori oleh Douglas C. North (1955) dan kemudian dikembangkan oleh Tiebout (1956) mendasarkan pandangannya dari sudut teori lokasi. Kelompok ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu *region* akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap wilayah dan hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat. Ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah, strategi pembangunan harus disesuaikan dengan lokasi dimana investasi akan dikembangkan.

2.3 Peran Investasi dalam pengembangan wilayah

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari sedikit daerah pemekaran dengan trend kinerja ekonomi yang makin baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 10 tahun sejak pemekaran berada diatas rata - rata nasional. Dengan pertumbuhan rata-rata diatas 6% dan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di region Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yaitu mencapai 7,63% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 hanya sebesar 7,54%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sebagian besar disumbangkan oleh peran pemerintah sementara kontribusi investasi dan ekspor masih relative rendah. Kontribusi investasi hanya sebesar 16% dari PDRB sementara investasi pemerintah pada APBN dan APBD sebesar Rp. 4268,2 milyar pada tahun 2010. Sedangkan realisasi investasi diperkirakan mencapai tidak lebih dari Rp. 1000 milyar.

Provinsi Gorontalo sedang melakukan pembangunan diberbagai sektor baik fisik maupun non fisik. Pelayanan masyarakat pun menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Provinsi ini baru terbentuk dan mempunyai potensi investasi baik dibidang pertanian, perikanan, pertambangan maupun bidang industri. Untuk itu, pemerintah juga berupaya membuka daerah baru dengan mengundang investor datang dan berinvestasi di Provinsi Gorontalo.

2.3.1 Kondisi Ekonomi.

Membaiknya perekonomian Gorontalo sangat dipengaruhi oleh peningkatan kinerja sektor yang membentuk struktur PDRB. Dari sisi sektoral, pada tahun 2010, PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 8.056 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK) adalah sebesar 2.917 milyar Rupiah. Struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi sector pertanian dengan share mencapai 31,32% meningkat dari

tahun sebelumnya sebesar 30,51% disusul sector jasa sebesar 26,57% pada tahun 2009 Realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 adalah sebesar 592.932 milyar Rupiah. Sementara itu, realisasi anggaran belanja Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 adalah sebanyak 567.220 milyar Rupiah. (BPS, 2012)

2.3.2 Perkembangan Investasi.

Sejak tahun 2006 – 2011 realisasi investasi di Provinsi Gorontalo baik PMA maupun PMDN mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 realisasi investasi PMA sebesar US\$ 62,990,740 dengan jumlah proyek sebanyak 7, pada tahun 2007 62,793,383; Tahun 2008 sebesar US\$ 60,030,000; tahun 2009 sebesar US\$ 54,793,062; dan pada tahun 2010 menurun menjadi US\$ 24,659,241, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi US\$26,483,846. Fluktuasi realisasi investasi ini disebabkan ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan LKPM nya sehingga tidak diperoleh data yang akurat disamping itu ada beberapa perusahaan yang mengalami pailit karena masalah internal perusahaan (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012)

2.3.3 Investasi Asing (PMA).

Secara kumulatif sejak tahun 2006 – 2011, persetujuan investasi asing di Provinsi Gorontalo mencapai 26 proyek dengan total nilai investasi mencapai US\$110,884,000,000. Jumlah persetujuan penanaman asing menurut sector meliputi proyek di Sector Primer (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan) dengan jumlah persetujuan 22 proyek dengan nilai total investasi US\$ 110,882,000,000 (99.94%); 4 proyek Sector Sekunder (industry makanan, tekstil, kulit, barang-barang dari kulit, dan sepatu, kayu, kertas, barang-barang dari kertas dan pencetakan, kimia dasar, barang-barang kimia dan farmasi, barang-barang dari karet dan plastic, mineral non logam, logam dasar, barang-barang dari logam, peralatan medis, optic, alat-alat pengukuran, alat-alat transportasi, dan industry lainnya) dengan

total nilai investasi sebesar US\$ 63,700,000 (0,06%); sementara belum ada proyek yang bergerak di sector tersier (0%). Sedangkan realisasi investasi PMA menurut sector untuk tahun 2011 meliputi sebanyak 9 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US\$ 26,483,846; yang meliputi proyek di sector primer (8 proyek; US\$ 17,825,872), sector sekunder (1 proyek; US\$ 8,657,974). (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012)

2.3.4 Investasi Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2006 – 2011 tercatat sebanyak 5 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp. 378,699,000,000,-. Jumlah persetujuan penanaman modal dalam negeri menurut sector meliputi proyek di Sector Sekunder (industry makanan, tekstil, kulit, barang-barang dari kulit, dan sepatu, kayu, kertas, barang-barang dari kertas dan pencetakan, kimia dasar, barang-barang kimia dan farmasi, barang-barang dari karet dan plastic, mineral non logam, logam dasar, barang-barang dari logam, peralatan medis, optic, alat-alat pengukuran, alat-alat transportasi, dan industry lainnya) dengan jumlah persetujuan 1 proyek dengan nilai total investasi US\$ 46,944,000,000 (8,2%); 4 proyek Sector Tersier dengan total nilai investasi sebesar US\$ 572,199,000,000 (91,8%); sementara belum ada proyek yang bergerak di sector primer(0%). Sedangkan realisasi investasi PMDN menurut sector untuk tahun 2011 sebanyak 2 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 56,841,088,211; yang meliputi proyek di sector tersier (2 proyek; Rp. 56,841,088,211). (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012)

Bab III

Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Titik berat penelitian adalah mengungkapkan potensi ekonomi di Provinsi Gorontalo yang menjadi bisa ditawarkan dan berpotensi untuk menjadi peluang investasi dalam berbagai sector ekonomi. Selama ini permasalahan yang dihadapi oleh calon investor adalah pada kepastian berusaha antara lain pada kepastian memperoleh lahan baik dari sisi kelayakan lahan maupun pada kepastian perizinan, tidak tumpang tindih dan mengandung azas kepastian hukum. Untuk itu dalam penelitian ini akan diungkapkan pemanfaatan lahan serta izin-izin yang telah dikeluarkan pada lahan APL dan HGU di Provinsi Gorontalo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan lokasi tersebar di Kabupaten dan kota secara sektoral yaitu sesuai potensi pada masing-masing sector yaitu Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Pertanian, Sektor Perkebunan, Sektor Peternakan, Sektor Perikanan dan Kelautan, Khusus kajian tentang pemanfaatan lahan APL dan HGU juga tersebar sesuai data lahan APL dan HGU yang tersedia serta pemanfaatannya berdasarkan data perizinan yang sudah dikeluarkan tentang pemanfaatan lahan APL dan HGU pada masing-masing wilayah.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data potensi ekonomi pada masing-masing sector yang tersebar pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder pada masing-masing sektor ekonomi. Demikian halnya sebaran data APL dan HGU merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional.

3.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan tentang sebaran data tanpa mengungkapkan hubungan data serta pengaruh antar variable. Walaupun sifatnya deskriptif namun hasil penelitian sangat bermanfaat dalam menjelaskan suatu fenomena sehingga kesimpulannya sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan. Potensi lahan dan pemanfaatannya akan dijelaskan secara deskriptif baik dengan angka nominal maupun angka relative.. Teknik pengungkapan angka relative akan menggunakan angka prosentase (P) yang dihitung dengan prosentase dari angka tertentu pada pembilang (X) dibagi dengan angka tertentu pada penyebut (N) kali 100 %. Secara matematis hal ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{N} \times 100 \%$$

Dimana : P = Prosentse

X = Angka Pembilang.

B = Angka Penyebut

Bab IV

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Kondisi Umum Wilayah

4.1.1 Luas wilayah

Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Sebelumnya Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.215,44 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038.585 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km². Pejabat Gubernur Gorontalo yang pertama adalah Drs. Tursandi Alwi yang dilantik pada peresmian Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001. Tanggal ini selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo hingga sekarang.

Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (Enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.735,93 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.291,81 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.777,03 km².

Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kabupaten Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0.55%

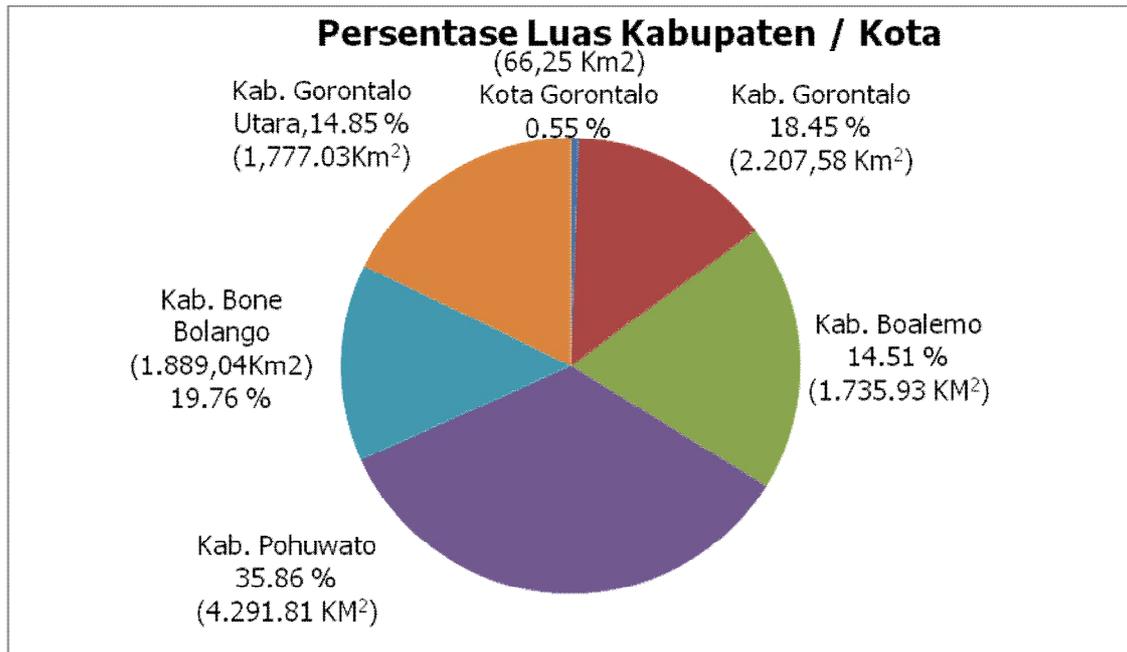
dari total luas wilayah Gorontalo. Di dalam pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2007 direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota.

Sampai dengan September 2011, wilayah administrasi Provinsi Gorontalo mencakup 5 Kabupaten (Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato), 1 Kota (Kota Gorontalo), 75 Kecamatan, 532 Desa, dan 69 Kelurahan. Data ini terus mengalami perubahan seiring dengan adanya proses pemekaran Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, atau Kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo.

4.1.2 Topografi

Wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl) Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).



Gambar 13. Persentase Luas Kabupaten / Kota Sumber : Gorontalo dalam angka tahun 2011

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut. Provinsi Gorontalo juga dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan aliran 99,3 km. sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 1. Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Persentase
A	0-2	123.596	10.3
B	2 – 8	69.156	5.8
C	8 – 15	61.572	5.1
D	15-40	109.041	9
E	>40	833.399	69.7
	Jumlah	1.196.764	100

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2007

4.1.3 Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan, daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batunya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut :

- Formasi Tinombo (Teot) : Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari : batu pasir wake, batulanau, batu lumpur, konglomerat, tuf lapili, aglomerat, breksi gungapi,

lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokapa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.

- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokapa dan intrusi Diorit Bolihutuo secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari : aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas – Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, klasirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plitosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah – Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plitosen Atas – Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat mengangan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik).

Kegiatan tektonik di daerah ini diduga telah berlangsung sejak Eosen hingga Oligosen yang diawali dengan kegiatan magmatik yang menghasilkan satuan gabro. Masih pada Eosen terjadi pemekaran dasar samudera yang berlangsung hingga Miosen Awal dan ini menghasilkan

lava bantal yang cukup luas. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh terjadinya retas – retas yang umumnya bersusun basa dan banyak menerobos Formasi Tinombo.

Pada Miosen selain terjadi pengendapan Formasi Randangan dan Formasi Dolokapa terjadi juga kegiatan magma yang menghasilkan Diorit Bone. Diduga pada waktu itu terjadi juga penunjaman dari arah utara ke arah selatan di laut Sulawesi, yang disebut sebagai Jalur Tunjaman Sulawesi Utara (Simanjuntak, 1986). Kegiatan magnetik Diorit Bone yang berlangsung sampai Miosen Tengah dilanjutkan oleh kegiatan magmatik Diorit Bolihutuo yang berlangsung hingga Miosen Akhir. Bersamaan dengan kegiatan magmatik tersebut terjadilah pengangkatan pada akhir Miosen Akhir.

Pada akhir kegiatan magmatik Diorit Bolihutuo terjadilah kegiatan gunungapi yang menghasilkan batuan Gunungapi Pani dan Breksi Wobudu. Pada waktu itu Jalur Tunjaman Sulawesi Utara diduga masih aktif dan menghasilkan sejumlah sesar geser di bagian barat daerah penyelidikan. Pada Kala Pliosen terjadi juga kegiatan magmatik yang menghasilkan batuan terobosan Granodiorit Bumbulan yang kemudian diikuti oleh kegiatan gunungapi. Kegiatan gunungapi ini berlangsung hingga Plistosen. Sementara itu retas-retas yang bersusunan basal, andesit dan dasit masih terbentuk.

Pada akhir Pliosen hingga Plistosen di daerah ini terdapat pengendapan yang membentuk satuan Batugamping Klastik pada laut dangkal. Sedangkan pada Pliosten Awal terbentuk endapan danau dan endapan sungai tua. Ketiga satuan tersebut telah mengalami pengangkatan pada sekitar akhir Plistosen. Pada akhir Plistosen hingga sekarang terjadi proses pendataran serta kegiatan tektonik yang masih aktif. Proses pendataran menghasilkan endapan aluvium sedangkan kegiatan tektonik menghasilkan beberapa sesar geser dibagian timur serta mengakibatkan terangkatnya satuan Batugamping Terumbu.

4.2 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari Tahun 2007 – 2011 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dimana Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo berada pada kisaran angka 7.51%, yang kemudian naik menjadi 7.76 % tahun 2008. Selanjutnya tahun 2009 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu 7.54%, dan pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan mencapai 7.63%. Kemudian tahun 2011 meningkat 0.05% atau mencapai 7.68%

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir ini terutama dipicu oleh bertambahnya infrastruktur dasar dari pemerintah, daya beli masyarakat mulai meningkat yang diperlihatkan dengan kenaikan PDRB baik ADHK maupun ADHB serta pendapatan perkapita yang diikuti dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan, demikian pula infrastruktur perdagangan dari sektor swasta juga mulai tumbuh. Bertambahnya infrastruktur tersebut tadi setidaknya merupakan dampak dari pemerataan wilayah administrasi pemerintah dan terselenggaranya even-even internasional seperti seminar jagung internasional 2013, Pospenas 2013 dan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Provinsi Gorontalo tahun 2011.

Pertumbuhan infrastruktur dasar, daya beli masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan infrastruktur perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pengembangan ekonomi Provinsi Gorontalo lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi Provinsi Gorontalo di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi yang baru,

yaitu pembangunan infrastruktur di tiap Kabupaten/Kota yang lebih mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai.

4.3 Kependudukan

4.3.1 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2010 sebanyak 1.040.164 jiwa. Dari tabel di bawah ini bisa dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2010 penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 34.22% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2006-2010

No.	Wilaya Administrasi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
01	Kabupaten Gorontalo	431.440	338.381	339.620	340.730	355.988
02	Kabupaten Boalemo	118.947	123.243	127.639	128.540	129.253
03	Kabupaten Pohuwato	110.481	112.532	114.572	116.203	128.748
04	Kabupaten Bone Bolango	127.977	129.025	130.025	131.781	141.915
05	Kab. Gorontalo Utara	-	94.829	95.177	96.489	104.133
06	Kota Gorontalo	159.455	162.325	165.175	170.209	180.127
Provinsi Gorontalo		948.3	960.335	972.208	983.952	1.040.164

Sumber ; Gorontalo dalam angka 2011

Jika dibandingkan dengan luas wilayah. Kota Gorontalo hanya punya wilayah seluas 66.25 Km² namun memiliki penduduk cukup besar. Hal ini menunjukkan, Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio,2010

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
01	Gorontalo	178.088	177.900	355.988	100,10
02	Boalemo	65.867	63.386	129.253	103,91
03	Pohuwato	65.561	63.187	128.748	103,76
04	Bone Bolango	71.145	70.770	141.915	100,53
05	Gorontalo Utara	52.970	51.163	104.133	103,53
06	Kota Gorontalo	88.283	91.844	180.127	96,12
Provinsi Gorontalo		521.914	518.250	1.040.164	100,71

Sumber : Gorontalo dalam angka 2011

Tabel diatas menunjukkan penduduk Provinsi Gorontalo lebih banyak laki-laknya dengan sex ration 100.74 artinya laki – laki di Gorontalo lebih banyak 0,71% dibanding jumlah perempuan. Sedangkan untuk kabupaten/kota bisa dilihat bahwa Kabupaten Boalemo yang memiliki sex ratio sebesar 104 yang menunjukkan jumlah laki – laki di Kabupaten Boalemo lebih 4% dibanding perempuan.

4.3.2 Pertumbuhan penduduk

Pada tabel di bawah ini laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo di tahun 2010 sebesar 2.28% dengan pertumbuhan terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo sebesar 3.62 % dan urutan dibawahnya adalah Kabupaten Pohuwato sebesar 3.25%. hal ini disebabkan di kedua Kabupaten tersebut menjadi wilayah transmigran di Provinsi Gorontalo. Sementara Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang sedikit berkontribusi terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu hanya sebesar 1.40%.

Kondisi ini dikarenakan makin terbatasnya lahan garapan yang ada. Sedangkan Kota Gorontalo mempunyai luas wilayah yang kecil dan paling padat penduduknya di antara semua wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2.93%.

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan
		2000	2010	2000-2010
01	Gorontalo	309.663	355.988	1,40
02	Boalemo	90.538	129.253	3,62
03	Pohuwato	93.505	128.748	3,25
04	Bone Bolango	114.766	141.915	2,15
05	Gorontalo Utara	86.781	104.133	1,84
06	Kota Gorontalo	134.931	180.127	2,93
Provinsi Gorontalo		830.184	1.040.164	2,28

Sumber : Gorontalo dalam angka 2011

4.3.3 Tenaga kerja

Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo tahun 2011 menunjukkan, dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebesar 725.243 yang merupakan angkatan kerja sebesar 465.027 atau sebesar 64.12 persen. Dari jumlah tersebut yang sedang bekerja sebesar 445.210 atau 95.74 persen dan yang menganggur sebesar 19.817 atau 4.26 persen. Sementara yang bukan merupakan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga, bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah) sebanyak 260.216 atau 35.58 persen dengan jumlah terbanyak pada yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 171.805 atau 66.02 persen dan bersekolah sebanyak 33.142 atau 12.74 persen dan lain-lain (yang bukan mengurus rumah tangga dan bersekolah) sebanyak 55.270 atau 21.24 persen.

4.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebesar 64.12%. Posisi angkatan tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 64.42%. sementara itu jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang. Atau 4.26% dari jumlah angkatan kerjanya, jumlah tersebut mengalami kenaikan

sebanyak 3.756 orang dari Agustus tahun 2010. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo selama tiga tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu di tahun 2009 sebesar 5.89%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5.16% di Tahun 2010 pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4.26%.

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut jenis kegiatan utama

Jenis Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011
I Angkatan Kerja	429.384	447.313	456.499	465.027
1 Bekerja	405.126	420.962	432.926	445.210
2 Menganggur	24.258	26.351	23.573	19.817
II Bukan Angkatan Kerja	258.697	254.182	252.182	260.216
1 Sekolah	58.748	62.316	57.980	33.142
2 Mengurus rumah Tangga	165.379	161.296	159.541	171.804
3 Lainnya	34.570	30.570	34.661	55.270
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62.40	63,77	64,42	64,12
Tingkat Pengangguran	5,65	5,89	5,16	4,26

Sumber : BPS Gorontalo, 2012

Dari tabel sebelumnya ini dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja berjumlah 405.126 dan pada tahun 2009 berubah menjadi 420.962 mengalami peningkatan sejumlah 15.836 atau sebesar 3.90 persen.

Sedangkan pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja berada pada angka 432.926 meningkat sebesar 11.964 atau 2.84 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara sektor yang menjadi primadona dengan meraup tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang pada tahun 2010 mencapai 176.974, disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 81.322 ditempat ketiga sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar

71.243. sedangkan sektor yang paling sedikit meraup tenaga kerja pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, gas dan air minum sebesar 679 yang disusul sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewahan dan jasa perusahaan.

Sementara ditahun 2011 sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mengakomodasi jumlah tenaga kerja terbesar yaitu sejumlah 158.973, diikuti sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 91.393 dan sektor lainnya yang merupakan akumulasi dari sektor Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 84.978.

4.3 Pemerintahan

4.3.1 Administrasi wilayah

Provinsi Gorontalo terbagi dalam lima kabupaten dan satu kota. Masing – masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Provinsi Gorontalo terdiri dari 75 kecamatan dan 637 desa/kelurahan. Adapun sebaran kecamatan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah kecamatan dan desa di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
Kabupaten Boalemo	7	84
Kabupaten Bone Bolango	17	156
Kabupaten Gorontalo	18	205
Kabupaten Gorontalo Utara	11	60
Kabupaten Pohuwato	13	82
Kota Gorontalo	9	50
Total Provinsi Gorontalo	75	637

Sumber; Data utama hasil olahan 2013

Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Gorontalo. Sampai dengan tahun 2011 telah menjadi penyesuaian data wilayah administrasi sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Dasar hukum pembentukan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Dasar Hukum	Luas (Km²)	Persentase
Kabupaten Boalemo	Tilamuta	UU. No. 50 Tahun 1999	1.735,93	14,51%
Kabupaten Bone Bolango	Suwawa	UU. No.6 Tahun 2003	1.889,04	19,76%
Kabupaten Gorontalo	Limboto	UU. No.29 Tahun 1959	2.207,58	18,45%
Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang	UU. No.11 Tahun 2007	1.777,03	14,85%
Kabupaten Pohuwato	Marisa	UU.No.6 Tahun 2003	4.291,81	35,86%
Kota Gorontalo		UU.No.38 Tahun 2000	66.25	0,55%

Sumber: data utama hasil olahan 2013

4.3.2 Aparat pemerintah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Gorontalo berjumlah 3.113 orang. Sebagian besar didominasi oleh pegawai negeri yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 38,58%, sedangkan pendidikan tertinggi yaitu S3 hanya sebesar 0.19 persen atau hanya 6 orang

4.3.3 Partai politik

Jumlah anggota legislatif yang ada di Provinsi Gorontalo tahun 2010 berjumlah 45 orang, terdiri dari 13 orang dari Partai Golkar, 5 orang dari PPP, 5 orang dari Hanura, 4 orang dari Demokrat, dan 5 orang dari PAN. Untuk PDI-P, PBB, dan PKS masing-masing 3 orang. Sedangkan Gerindra, PPRN, PKNU dan PDK masing-masing 1 orang.

4.4 Potensi sumberdaya alam

Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, serta pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan.

4.4.1 Potensi Pertanian

Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 11.967,64 Km² atau 1.196.764 Ha, dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 27.520 Ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 22.015 Ha dan sawah non irigasi seluas 7.551 Ha. Juga terdapat lahan bukan sawah seluas 558.840 Ha, ladang/huma 74.466 Ha, lahan yang sementara tidak digunakan 95.871 Ha, lainnya perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/empang, dan lain-lain seluas 237.343 Ha.

Sektor pertanian menjadi leading sector pengembangan ekonomi lokal karena tenaga kerja dan kontribusi PDRB masih sangat dominan. Dari aspek sumber daya lahan, Provinsi Gorontalo memiliki potensi luas areal sawah sekitar 27.520 Ha. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 12.942 Ha (47%), kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 4.603 Ha (17%), Kabupaten Boalemo 4.537 Ha (16%), Kabupaten Pohuwato 2.681 Ha (10%), Kabupaten Bone Bolango 1.841 Ha (7%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%)

Luas lahan kering yang dapat diusahakan untuk pengembangan komoditas pangan lainnya dan hortikultura seluruhnya seluas 284.822 Ha. Dimana tingkat penggunaannya di Kabupaten

Gorontalo telah mencapai 79.531 Ha (28%), Kabupaten Pohuwato 71.791 Ha (25%), Kabupaten Boalemo 61.827 Ha (22%), Kabupaten Gorontalo Utara 46.898 Ha (16%), Kabupaten Bone Bolango 22.357 Ha (8%) serta Kota Gorontalo 2.418 Ha (1%)

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo terdiri atas 7 (tujuh) komoditi yaitu Padi (padi sawah dan ladang), Jagung Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Tabel di atas menunjukkan rata – rata peningkatan produksi padi sawah selang 2007 – 2011 pertahunnya meningkat 6.98 %. Pada periode yang sama produksi jagung meningkat 5.37%, sedangkan komoditi lainnya (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) mengalami penurunan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki luas tanam padi yang terbesar yaitu 24.388 Ha dengan produksi 117.377 ton/ha dan terkecil Kota Gorontalo dengan luas 2.024 dengan produksi 12.024 ton/ha. Selanjutnya untuk luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung, Kabupaten Pohuwato berada diperingkat tertinggi, yaitu 326.142 ton/ha, Kabupaten Boalemo yaitu 140.653 ton/ha, Kabupaten Gorontalo 96.563 ton/ha, Kabupaten Gorontalo Utara 21.698 ton/ha, Kabupaten Bone Bolango 20.420 ton/ha dan yang terakhir Kota Gorontalo dengan produksi 303 ton/ha.

Komoditas lain yang terdapat di Provinsi Gorontalo adalah kedelai akan tetapi komoditas kedelai belum berkembang karena luas arealnya relatif terbatas kecuali Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Dan luas tanam lebih terbesar ada di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu 1.799 ha dengan produksi 1.870 ton/ha. Selain komoditas tersebut di atas Gorontalo memiliki potensi hasil perkebunan. Saat ini luas areal perkebunan 360.376 ha dan luas perkebunan yang termanfaatkan 118.063 ha. Peluang inventasi masih terbuka di perkebunan

242.313 ha. Komoditas perkebunan yang dominan adalah Kelapa dengan luas areal 68.248 ha, Kakao 12.483 ha, Cengkeh 8.280 ha dan tebu 7.818 ha.

Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Terjadinya peningkatan produksi tanam kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar 62.338 ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 ton menjadi 901 ton pada tahun 2012.

Untuk peternakan yang prioritas adalah ternak sapi, saat ini jumlah populasi sapi 192.066 ekor sementara produksi daging sapi 3.984.995 kg/th. Selain sapi, Provinsi Gorontalo memiliki jenis ternak yang dikembangkan, antara lain kambing, babi, kuda, ayam kampung (buras), ayam ras (pedaging dan petelur), itik. Untuk tahun 2011 populasi ternak ayam kampung 964.000 ekor, ternak ayam petelur 132.000 ekor, ternak ayam pedaging 240.000 ekor dan ternak itik berjumlah 56.907 ekor.

Peran penyuluh tidak bisa diabaikan dalam suksesnya program. Penyuluh pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, perikanan dan kehutanan, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan para petani-nelayan beserta keluarganya. Pekerjaan seorang penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi membimbing dan mendorong para petani, nelayan mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha tani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera.

Keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mendapat kontribusi dari tugas penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, peternak, dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di Gorontalo saat ini berjumlah 618 orang yang tersebar

diseluruh kabupaten/kota, yang terdiri dari 518 orang penyuluh perikanan dan 32 orang penyuluh kehutanan.

Dilihat dari jumlah desa yang ada di Gorontalo maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu peningkatan mutu penyuluhan melalui : perbaikan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan SDM Penyuluh, pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, penguatan kelembagaan penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, peningkatan kesejahteraan penyuluh serta lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah.

Dengan memperhatikan Indeks pertanaman padi sawah masih $< 200 \pm 2.404$ ha atau 8.13 %, sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi padi sawah bilamana dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami lebih dari dua kali ($IP > 200$). Demikian halnya dengan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 1.936 ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi ladang maupun komoditi pertanian lainnya. Di samping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana program pembangunan pertanian menunjukkan kinerja positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada prinsipnya, Nilai Tukar Petani ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (dalam persentase). Dari sisi kegunaannya NTP merupakan instrumen untuk melihat tingkat kemampuannya atau daya beli petani di pedesaan, disisi lain,

NTP juga menunjukkan daya tukar (tern of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Karena itu, semakin tinggi NTP, secara relatif menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Sedangkan, kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang bisa terancam kelestariannya.

NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga output pertanian, harga input pertanian, harga output sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga input sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga – harga diatas dengan tujuan yang sangat luas. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuk nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan di sektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar.

Berdasarkan hasil analisis data, pada periode Januari 2008 – Februari 2012, NTT Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Spetember 2008 sebesar 108,43 dan NTP terendah terjadi pada bulan Februari 2008 sebesar 94,28. Melihat matriks di atas, sejak Mei 2009 NTP Provinsi Gorontalo menunjukkan grafik kenaikan. Kondisi ini harus dipertahankan, karena itu, butuh berbagai intervensi Pemerintah Daerah sehingga NTP Gorontalo bisa mencapai kembali posisi pada September 2008.

Jika diamati lebih jauh, khusus untuk sektor pertanian, terdapat 5 sub sektor yang memberi pengaruh NTP Gorontalo yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat,

peternakan dan subsektor perikanan serta hortikultura. Posisi bulan Februari 2012, 4 (empat) sub sektor pertama mengalami penurunan dibanding bulan Januari 2012, masing-masing subsektor tersebut berturut-turut sebesar 1,26 persen, 0,34 persen, 0,44 persen dan 0,21 persen sedangkan subsektor terakhir yaitu hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen.

Tabel 8. Perbandingan NTP per sektor Januari-Februari 2012

Sub sektor	Bulan		Kenaikan/Penurunan
	Januari	Februari	
Tanaman pangan	95,29	94,09	-1,26
Hortikultura	108,05	109,12	0,99
Tanaman perkebunan	130,20	129,76	-0,34
Peternakan	92,77	92,36	-0,44
Perikanan	105,76	105,54	-0,21

Sumber: Badan statistik, 2012

Melihat realitas di atas, butuh upaya yang lebih keras lagi melalui berbagai intervensi khususnya di sektor pertanian. Ada 2 (dua) aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu dari sisi indeks yang diterima petani dan dari sisi indeks yang dibayarkan petani. Indeks yang diterima petani berarti produksi dan produktifitas sektor pertanian harus ditingkatkan, sedangkan aspek yang kedua intervensinya melalui jalur perdagangan barang dan jasa melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah

4.4.2 Potensi Perikanan

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapannya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya

mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun.

Dari potensi tersebut, realisasi capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap, maupun produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan rata – rata per tahun sebesar 12.34 % atau mengalami kenaikan produksi dari 120.962 ton pada tahun 2007 naik menjadi 206.227 ton pada tahun 2011.

Untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo terhadap bahan pangan cukup tinggi yaitu dari 33 kg/kapita pada tahun 2007 naik menjadi 46,93 kg/kapita pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 8,39 % pertahunnya. Jika ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi ikan minimum secara nasional atau berdasarkan sasaran nasional pada tahun 2011, maka tingkat konsumsi ikan Gorontalo melebihi dari target konsumsi ikan nasional, dimana target nasional hanya menargetkan 31,57 kg/kapita/tahun.

Tabel 9. Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Kg/kapita/tahun)

Tahun	Target	Realisasi	<u>Jumlah Produksi Ikan x 100%</u> Target daerah
2007	35,3	3	94,29
2008	37,3	7	100
2009	39,4	1	105,13
2010	40,29	44,94	111,54
2011	41,91	46,93	111,98

Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011

Jumlah kelompok nelayan dan pembudidayaan yang diintervensi oleh bantuan Pemerintah Provinsi, khususnya bantuan perikanan dan kelautan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2007 jumlah kelompok yang diintervensi oleh

bantuan perikanan dan kelautan hanya 211 kelompok dan pada tahun 2011 naik menjadi 415 kelompok seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Jumlah Kelompok Pembudidaya dan Jumlah Nelayan Penerima Bantuan

Tahun	Jumlah kelompok pembudidaya	Jumlah kelompok nelayan	Total kelompok
2007	73	138	211
2008	60	214	274
2009	50	272	322
2010	85	285	370
2011	128	287	415

Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011

Seiring dengan meningkatnya intervensi bantuan sarana produksi perikanan yang telah diterima oleh kelompok perikanan baik oleh nelayan maupun pembudidaya dari tahun 2007 – 2011, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Dimana pada tahun 2007, kontribusi produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok perikanan hanya sebesar 17,58 % dan pada tahun 2011 naik menjadi 26.82 %.

Tabel 11. Produksi Perikanan

Tahun	Jumlah Produksi Ikan kelompok pembudidaya dan nelayan (ton)	Total Jumlah Produksi Perikanan Gorontalo (tangkap dan budidaya) (ton)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan kelompok}}{100\% \text{ Produksi ikan Gorontalo}} \times 100\%$
2007	21.259	120.962	17,58
2008	25.686	141.721	18,12
2009	29.713	152.370	19,50
2010	40.786	165.984	24,57
2011	55.303	206.227	26,82

Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011

Produksi perikanan di Provinsi Gorontalo, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain untuk produksi perikanan tangkap dipengaruhi selain masalah musim juga dipengaruhi oleh Kenaikan harga bahan bakar minyak, dimana sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap. Produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi sarana produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan / bibit rumput laut, harga pakan dan pupuk serta sarana produksi lainnya.

Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Luas perairan mencapai 50.500 km² yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km², laut Sulawesi 3.100 km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km² serta panjang garis pantai 655.8 Km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 217.7 Km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 438.1 Km. potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan.

Untuk sektor perikanan, melalui program utamanya Pengembangan Sumber daya Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Hasil Perikanan, Pengawasan SDKP serta Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan akan memenuhi target RPJMD 2007-2012 sebesar 70.000-100.000 ton untuk perikanan tangkap dan untuk perikanan budidaya sebesar 50.000-70.000 ton. Hal ini juga dibarengi dengan perbaikan kinerja sektor perikanan dimana pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap mencapai 72.325 ton atau naik sebesar 46,81 persen jika dibandingkan produksi tahun 2006 yang hanya mencapai 49,263 ton. Demikian halnya dengan produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 mencapai 93.659 ton atau naik 41.24 persen jika dibandingkan tahun 2006 yang hanya sekitar 66.311 ton. Peningkatan

produksi perikanan ini turut serta memperbaiki pendapatan nelayan dari Rp. 897.942 ditahun 2006 menjadi Rp. 1.759.596 di tahun 2010 atau meningkat 95,96 persen.

Potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan jika saja aktivitas illegal fishing yang terjadi baik di sekitar Teluk Tomini maupun di pantai utara provinsi ini bisa diberantas. Potensi perikanan budidaya mencakup budidaya laut, air payau dan air tawar. Produksi budidaya laut sebesar 275.280 ton per tahun dengan luas area 25.050 dan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4.738, produksi budidaya air payau produksi 59.770 ton dengan luas area 10.900 dan tingkat pemanfaatan mencapai 3.136 dan produksi budidaya air tawar sebesar 4.218 ton per tahun dengan luas area 1.000 Ha dan tingkat pemafaatan mencapai 460 Ha.

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Gorontalo tahun 2010 adalah sebanyak 8.316 rumah tangga, atau meningkat 0,43 persen dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 8.280 rumah tangga. Menurut jenisnya, perikanan dibedakan menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Sebagian besar produksi perikanan dihasilkan oleh perikanan darat dengan cara budidaya. Produksi budidaya perikanan sebesar 93.658,52 ton atau sebesar 60,16 persen dari keseluruhan produksi ikan di tahun 2010 yaitu sebesar 155.700 ton

4.4.3 Potensi Kehutanan

Sektor kehutanan memegang peranan penting dalam akselerasi pembangunan di Propinsi Gorontalo. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Propinsi Gorontalo, luas kawasan hutan di Propinsi Gorontalo mencapai 824.668 ha. Adapun luas hutan berdasarkan wilayah administrasi dan fungsinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo

Fungsi	Luas (ribu Ha)	Prosentase (%)
HK	196.653	23,85
HL	204.604	24,81
HP	251.097	30,45
HPT	89.878	10,89
HPK	82.431,9	10,00
Total	824.668	100

Sumber: SK 325/Menhut-II/2010

Berdasarkan data pada tabel di atas luas fungsi hutan terbesar adalah hutan produksi tetap (HP) yakni 251.097 ha atau sekitar 30,45% dari seluruh total kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah yang memiliki luas hutan produksi terbesar yakni 41,507 ha (BPKH XV, 2012).

Meskipun memiliki potensi hutan yang cukup luas, secara fisik terdapat beberapa kawasan hutan yang sudah tidak berhutan lagi. Hasil analisa citra landsat tahun 2010 yang dilakukan oleh pihak BPKH XV luas kawasan hutan yang sudah tidak berhutan mencapai 55.674,52 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan produksi terbatas (HPT) merupakan wilayah yang kawasan hutan yang memiliki luas vegetasi yang rendah yaitu 28003,38 ha. Adapun luas kawasan hutan yang tidak berhutan diseluruh wilayah administrasi Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya

Tabel 13. Kawasan hutan yang berhutan dan tidak berhutan berdasarkan fungsinya

	Fungsi	Berhutan (ha)	Tidak Berhutan (ha)
	HK	51647,72	4294,76
	HL	194662,75	8462,26
	HP	48729,35	8431,53
	HPT	168087,77	28003,38
	HPK	6482,59	6482,59
	Total	469610,18	55674,52

Sumber: BPKH XV (2012)

Kawasan hutan yang tidak berhutan umumnya ditumbuhi dengan alang-alang, tanaman semusim dan belukar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan degradasi lahan hutan semakin meningkat. Degradasi hutan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan lahan kritis. Berdasarkan data dari BP-DAS Bone Bolango, luas lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan mencapai 63.629 ha sedangkan di luar kawasan hutan lebih besar lagi yaitu 143.205 ha. Namun demikian wilayah lahan agak kritis terbesar terdapat di dalam kawasan hutan yang mencapai 407.200 ha. Secara umum lahan kritis diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, serta pembukaan lahan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan seperti kebun-kebun masyarakat dan lain sebagainya. Situasi ini mereflesikan kebutuhan untuk pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Adapun luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel 14. Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

Tingkat Kekritisian	Dalam Kawasan (Ha)	Luar Kawasan Hutan (Ha)
1 Agak Kritis	407.200	162.965
2 Kritis	63.269	143.205
3 Potensial Kritis	338.844	31.540
4 Sangat Kritis	58.414	14.944
5 Tidak kritis	6.262	8.486
Jumlah	873.990	361.136

Sumber: BP-DAS Bone Bolango (2012)

4.4.4. Potensi pertambangan dan energi

Di bidang pertambangan potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas dengan potensi sebesar 218.133.132.151,07 ton. Perak dengan potensi 217.463.591,87 ton. Tembaga dengan potensi 217.976.091.224,87 ton. Batu andesit dengan potensi 2.506.000,00 ton, batu granit dengan potensi 888. 500.000 ton, batu dasit dengan potensi 1.776.125.000 ton, batu basal dengan potensi 1.000.000.000 ton. Batu gamping dengan potensi 19.948.748.500, feldspar dengan potensi 2.500.000 ton. Lempung dengan potensi 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu dengan potensi 282.250.000 ton, marmer dengan potensi 18.869.96 ton, dan toseki dengan potensi 51.247.568.62 ton. Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Gorontalo. Secara geologis, potensui bahan tambang Provinsi Gorontalo terbesar di seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 15. Jenis Mineral dan besaran volume

No	Jenis Mineral	Volume (ton)
1	Emas	218.133.132.151,07
2	Perak	217.463.591.225,87
3	Tembaga	217.976.091.224,87
4	Andesit	2.506.000
5	Batu granit	888.500.000
6	Batu dasit	1.776.125.000
7	Batu basal	1.000.000.000
8	Batu gamping	19.948.748.500
9	Feldspar	2.500.000
10	Lempung	750.000.000
11	Pasir/batu/sirtu	282.250.000
12	Marmer	18.869.96
13	Toseki	51.247.568.62

Sumber: Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi

1. Kelistrikan

Kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430.69 MW dan beban puncak 266.40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini sebesar 89.56 MW dan daya mampu 59.20 MW dan beban puncak 56.13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129.270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92.46 %. Pertumbuhan rata – rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8.6 s/d 10 %.

Ratio elektrifikasi saat ini sebesar 69.97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 10700.6 Kms dan Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah. Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65.4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175.4 MW dan yang baru dimanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3.5 MW.

Sedangkan potensi panas bumi Suwawa 110 MWe telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperatur 70⁰C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperatur 50⁰C, Kecamatan Botumoito dengan temperatur 42⁰C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperatur 62⁰C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65⁰C. dengan total sumber daya diperkirakan sebesar 160⁰ (MWe).

Selain memiliki sumber daya energi, Gorontalo juga memiliki beberapa sumber daya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logal, non logam dan batuan. Bahan mineral pengikutnya serta bahan mineral non logam terdiri dari batu andesit, granit, basal, batu gamping, feldspar, lempung, pasir, batu dan sirtu, marmer, dan toseki. Saat ini jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 39 buah terdiri dari kontrak karya 2 buah dan IUP 37 buah. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral lebih dititik beratkan pada tertib administrasi perizinan serta pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan

4.4.5. Kondisi Wilayah Areal Penggunaan Lain

Selain kawasan hutan, Provinsi Gorontalo memiliki kawasan untuk kepentingan budidaya, pemukiman atau pembangunan di luar sektor kehutanan. Wilayah tersebut adalah areal penggunaan lain (APL). Penggunaan dan pemanfaatan APL sangat dinamis dibandingkan dengan kawasan hutan. Dalam struktur ruang RTRW, wilayah APL diarahkan untuk membangun berbagai fasilitas publik dan menjadi pusat wilayah pertumbuhan. Di Lokasi APL bisa dibangun infrastruktur seperti pabrik, jalan, pemukiman bahkan untuk perkebunan skala besar. Berikut ini disajikan luas APL untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo

Tabel 16. Luas APL setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten	Luas (ha)
1	Kabupaten Gorontalo	111.347,51
2	Kabupaten Boalemo	78.236,68
3	Kabupaten Pohuwato	117.741,60
4	Kabupaten Bone Bolango	49.237,93
5	Kabupaten Gorontalo Utara	52.662,69
6	Kota Gorontalo	6.152,95
	Jumlah	429.568,85

Sumber: hasil analisis spatial 2013

Berdasarkan data di atas terlihat total kawasan APL di Provinsi Gorontalo mencapai 429.568 ha atau sekitar 50% dari total kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. Luas APL terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato yang mencapai 120.379,78 dan terkecil terdapat di wilayah Kota Gorontalo yang mencapai luas 6.311,03 ha.

1. Kemiringan lereng

Lereng adalah Kenampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi apabila beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan dengan jarak lurus mendatar sehingga akan diperoleh besarnya kelerengan (slope). Bentuk Lereng tergantung pada proses erosi juga gerakan tanah dan pelapukan. Lereng merupakan parameter topografi yang terbagi dalam dua bagian yaitu kemiringan lereng dan beda tinggi relative, dimana kedua bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap penilaian suatu lahan kritis, bila dimana suatu lahan yang dapat merusak lahan secara fisik, kimia, dan biologi, sehingga akan membahayakan hidrologi produksi pertanian dan pemukiman. Salah satunya dengan membuat Peta Kemiringan Lereng (Peta Kelas Lereng). Dengan pendekatan rumus "Went-Worth" yaitu pada peta topografi yang menjadi dasar pembuatan peta kemiringan lereng dengan dibuat grid atau jaring-jaring berukuran 1 cm kemudian masing-masing bujur sangkar dibuat garis horizontal. Dengan mengetahui jumlah konturnya dan perbedaan tinggi kontur yang memotong garis horizontal tersebut, dapat ditentukan kemiringan atau sudut lereng

Suatu daerah dapat diukur ketinggiannya atau dapat diklasifikasikan kemiringan lerengnya dengan melihat jumlah garis yang terpotong dalam grid-grid yang telah dibuat. Kemudian hasilnya dihitung dan dapat dimasukkan ke dalam aturan hasil perhitungan kemiringan lereng. Sehingga dapat diperoleh hasil mengenai pengklasifikasian kemiringan lereng pada suatu daerah. Dalam mengukur kemiringan lereng dapat dilakukan dengan cara: Metode Blong (1972), Metode Wentworth, Metode Lingkaran dan Menggunakan kompas geologi Kelas Kemiringan Lereng antara lain:

Tabel 17. Kelas lereng

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Klasifikasi
Kelas I	< 8	Datar
Kelas II	8 – 15	Landai
Kelas III	15 – 25	Agak curam
Kelas IV	25 – 40	Curam
Kelas V	➤ 40	Sangat curam

Sumber: Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, 1986

Berdasarkan hasil analisa spatial umumnya wilayah APL memiliki lereng yang datar yaitu seluas 250.028,9 ha atau 58,36% dari seluruh total APL. Sedangkan untuk lereng sangat curam mencapai luas 2.129,67 ha atau hanya sekitar 4,9% dari total kawasan APL. Wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah yang datar paling luas dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang mempunyai lereng yang curam paling luas dengan luas wilayah mencapai 1237 ha. Hal ini wajar karena hampir 70% wilayah Kabupaten Bone Bolango merupakan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Adapun tingkat kelerengan di wilayah APL dan sebarannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

Tabel 18. Tingkat kelerengan di wilayah APL

Kabupaten/Kota	Tingkat Kelerengan					Jumlah
	0 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Boalemo	50841,96	17288,55	8397,92	2421,35	116,96	79066,74
Bone Bolango	15540,46	10106,93	13665,13	8885,41	1237,00	49434,92
Gorontalo	71402,79	20415,09	16519,46	5561,74	28,50	113927,57
Gorontalo Utara	24734,07	14442,99	13975,7	5808,39	515,35	59476,51
Kotamadya	3776,85	753,98	1270,56	496,58		6297,97
Pohuwato	83732,8	25024,46	8642,15	2603,98	231,86	120235,26
Grand Total	250028,9	88032	62470,92	25777,46	2129,67	428438,97

Sumber; hasil analisis spatial, 2013

Kartasapoetra (2005). Menjelaskan Kemiringan lahan merupakan faktor yang sangat perlu untuk di perhatikan sejak dari penyiapan lahan pertanian, usaha penanamannya, pengambilan produk-produk serta pengawetan lahan tersebut. Karena lahan memiliki kemiringan lereng itu dapat dikatakan akan lebih mudah terganggu atau rusak. Lebih-lebih kalau derajat kemiringannya besar tanah yang memiliki kemiringan rentan terhadap pengaruh hujan. Akibat pengaruh hujan-hujan tersebut tanah mudah mengalami kelongsoran dan hanyutnya lapisan tanah yang subur (humus). Kartasapoetra (2006 : 37) di jelaskan mengenai tipe kemiringan lereng yang dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama hujan sebagai berikut:

a) Kemiringan Lahan 0-8%

Lahan dengan lereng 0-8 % adalah lahan yang datar yang memiliki kedalaman efektif yang bisa mencapai 5 meter. Kedalaman efektif sangat penting untuk sistem perakaran tanaman. Umumnya wilayah-wilayah dengan kelerengan antara 0-8% adalah wilayah pertanian, perkebunan dan pemukiman. Wilayah ini mengalami pengikisan tanah yang rendah, aliran permukaan yang rendah dan infiltrasi yang lambat. Produktivitas lahan pada lereng 0-8% lebih baik jika dibandingkan dengan lereng yang lebih dari 8%, karena kandungan unsur hara pada lapisan *top soil* relatif terjaga

b) Kemiringan Lahan 8-15

Tanah pada kemiringan lereng ini memiliki kedangkalan tanah serta gejala-gejala erosi dan lapisan top soilnya pernah mengalami pengikisan dan hanyut, diperlukan tindakan-tindakan praktis berupa perlindungan terhadap kelembaban tanah agar produktivitas tanah itu dapat di pertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan-tindakan praktis ini berupa perlindungan kelembaban tanah, dan mengusahakan pada musim hujan tanah tidak terhanyut

oleh air, pengolahan tanah menurut kontur, menggunakan sisa-sisa tanaman (pemberian mulsa) dan penambahan pupuk kandang.

c) Kemiringan Lahan 15-25%

Pada kemiringan lereng ini sudah dapat dikatakan agak curam lapisan top soil rentan terjadinya pengikisan akibat laju limpasan semakin besar, perlunya di adakan tindakan-tindakan seperti membuat terassing, membenamkan pupuk hijau, pupuk organis atau pun pupuk buatan ke dalam tanah, membuat larikan dimana tanaman itu akan di tanam dan mengusahakan agar drainasenya dapat berjalan sebaik mungkin.

d) Kemiringan Lahan 25-40 %

Tanah pada kemiringan ini jika tidak terdapat vegetasi permukaan tanah mengalami erosi hebat, rendah kandungan kelembabanya serta di pengaruhi oleh angin kencang, tetapi pada kemiringan lereng ini masih bisa ditanami tanaman produksi pertanian dengan batasan-batasan tertentu misalnya, tanaman yang tumbuhnya rapat, tanaman tahunan dan rumput-rumputan.

e) Kemiringan Lahan lebih dari 40%

Pada kemiringan seperti ini tidak dianjurkan sebagai lahan pertanian melainkan sebagai wilayah hutan dengan di tanami pohon-pohon keras, rumput-rumputan dan semak belukar semuanya tetap dibiarkan subur dengan hal ini erosi dari atas dapat di perkecil

2. Penutupan lahan

Landuse (penggunaan lahan) dan **landcover** (penutupan lahan) sering digunakan secara bersama-sama. Kedua terminologi tersebut berbeda. Menurut Lillesand dan Kiefer pada tulisan mereka tahun 1979 kurang lebih berkata: penutupan lahan berkaitan dengan jesis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut. Townshend dan Justice pada tahun 1981 juga punya pendapat mengenai

penutupan lahan, yaitu penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis, tahun 1982, mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi berupa kenampakan hasil aktivitas manusia (penggunaan lahan)

Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di APL sangat dinamis. Tutupan lahan di APL didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dengan luasan 140.321 ha. Meskipun terletak di luar kawasan hutan, tutupan hutan didalam wilayah APL masih bisa ditemukan. Ini mengindikasikan bahwa beberapa wilayah APL masih ditutupi oleh kawasan hutan. Tipe tutupan hutan yang mendominasi adalah hutan sekunder seluas 65.774,96 ha. Tipe tutupan hutan sekunder di APL paling luas terdapat di Kabupaten Pohuwato seluas 57.933,70 ha. Disamping hutan sekunder di wilayah APL juga bisa ditemukan tipe tutupan hutan primer meskipun luasannya sangat kecil yang hanya mencapai 1287,42. Tipe tutupan lain yang bisa ditemukan di APL adalah pemukiman. Wilayah pemukiman paling luas terdapat di Kabupaten Gorontalo yang mencapai 8.887 ha. Tipe tutupan lahan ini dapat disaksikan langsung di lapangan. Untuk lahan sawah, luas tutupan lahannya mencapai 32.775,61 ha. Luas lahan sawah di Kabupaten Boalemo adalah terbesar dimana luasnya mencapai 68.93,95 ha. Luas lahan sawah di APL jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas semak belukar. Ini mengindikasikan masih banyak wilayah-wilayah di APL belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun beberapa wilayah yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah wilayah semak belukar yang luasannya mencapai 48.386,45 ha. Wilayah ini sangat luas jika dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sawah. Wilayah semak belukar terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan luasan mencapai 14.622,26 ha. Hasil identifikasi tutupan lahan juga memperlihatkan terdapat lahan yang tidak memiliki vegetasi dan termasuk dalam kategori tanah terbuka. Tanah terbuka dimasa yang akan datang dapat menimbulkan masalah terkait dengan

menurunnya produktivitas lahan akibat erosi. Sebaran tipe penutupan lahan di APL dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 19. Tipe Tutupan Lahan Hutan di APL

Tipe tutupan lahan	Kabupaten / Kota						Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Pohuwato	
Bandara/Pelabuhan			6,48	3,28			9,77
Hutan Mangrove Primer	146,66			697,94		442,82	1287,42
Hutan Mangrove Sekunder	432,22			576,20		1875,13	2883,55
Hutan Primer		450,02		645,22		765,77	1861,01
Hutan Sekunder	1909,32	3474,62	323,84	2045,95	87,53	57933,70	65774,96
Pemukiman	3484,03	2980,72	8877,00	2717,79	2626,99	2917,18	23603,71
Perkebunan	7493,03	507,91	2951,08	261,82		13229,20	24443,04
Pertanian Lahan Kering	21117,39	8336,98	38594,59	10038,32	419,41	4183,85	82690,53
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29257,23	17937,26	31675,26	34261,29	971,89	26218,83	140321,76
Rawa						353,89	353,89
Sawah	6893,95	2716,16	16557,06	1958,28	1063,26	3586,90	32775,61
Semak Belukar	8177,82	12986,47	14622,26	5927,18	1140,01	5532,71	48386,45
Semak Belukar Rawa	8,76		351,67	119,43	1,93	6,12	487,90
Tambak	184,84			392,43		3265,22	3842,49
Tanah Terbuka	78,25	91,90		58,64		353,13	581,92
Tubuh Air	103,54	0,00	36,01	49,62	0,0	75,31	264,48
Jumlah	79287,04	49482,03	113995,23	59753,39	6311,0	120739,77	429568,49

Sumber: Hasil analisis spatial 2013

3. Iklim

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan Februari yaitu 23,00⁰C. sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan Maret dengan suhu 33,9⁰C. suhu rata – rata Provinsi Gorontalo berkisar antara 24,4 – 28,0⁰C. Provinsi Gorontalo mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban mencapai 83,5 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Mei dengan 378 mm, tetapi jumlah hari hujan terbanyak terjadi bulan Juli sebanyak 22 hari. Rata-rata kecepatan angin tercatat di stasiun meteorologi untuk setiap bulannya yaitu berkisar antara 1,0 – 3,0 m/detik.

Tipe iklim di APL terbagi menjadi 2 yaitu iklim kering (tipe C) dan sangat kering (tipe E). Berdasarkan hasil analisis spasial iklim yang dominan di APL adalah iklim sangat kering, dimana lama bulan kering lebih panjang dari bulan basah. Cakupan wilayah yang beriklim sangat kering meliputi 177.635,79 ha, dengan wilayah administrasi yang memiliki iklim sangat kering terluas adalah Kabupaten Pohuwato yang mencapai 177.635,79 ha

Tabel 20. Tipe iklim di wilayah APL

Kabupaten / Kota	Tipe Iklim				Jumlah
	C1	C2	E1	E2	
Boalemo	45,00		38550,11	40524,54	79119,65
Bone Bolango		6072,48	24785,26	18567,64	49425,38
Gorontalo	25620,80	7498,52	52759,28	28029,47	113908,06
Gorontalo Utara	37553,41	21767,00			59320,41
Kota Gorontalo			896,43	5398,36	6294,80
Pohuwato	551,21		60644,71	59219,47	120415,39
Jumlah	63770,42	35337,99	177635,79	151739,49	428483,69

Sumber: hasil analisis spasial 2013

4. Jenis Tanah

Tanah merupakan bagian terluar kulit bumi, tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan bercampur dengan batuan organik. Pelapukan yang terjadi adalah pelapukan tanaman atau hewan yang telah berumur tua dan mengendap. Hasil endapan inilah yang membentuk tanah. Jenis tanah merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman karena perbedaan jenis [tanah](#) mempengaruhi sifat-sifat dari [tanah](#) tersebut. Untuk memahami hubungan antara jenis [tanah](#), diperlukan pengetahuan yang mampu mengelompokkan [tanah](#) secara sistematis sehingga dikenal banyak sekali sistem klasifikasi yang berkembang. Untuk mempelajari hubungan antar jenis [tanah](#) maka sistem klasifikasi [tanah](#) dibagi menjadi sistem klasifikasi alami dan sistem klasifikasi teknis.

Tabel 21. Luas dan Jenis Tanah di APL

Jenis Tanah	Kabupaten / Kota						Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Pohuwato	
Aluvial Hodromorf, Glei Humus						2231,05	2231,05
Aluvial	807,55			2423,36		27096,91	30327,82
Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning	19750,16		28487,28			17540,90	65778,34
Brown Forest Soil, Aluvial, Aluvial Hidromorf	8881,19	5832,51	8681,14		5494,31		28889,14
Danau			4414,76				4414,76
Grumusol, Mediteran Merah Kuning	9145,29		30019,42		216,04		39380,75
Latosol, mediteranian merah kuning				4702,67			4702,67
Latosol, litosol	21499,59		1410,23	156,73		10046,86	33113,42
Litosol	18,57						18,57
Mediteran Merah Kuning, Latosol		12638,07	11155,28	4295,90			28089,25
Mediteran Merah Kuning,	15357,31	30395,68	17968,46	33181,13	442,54		97345,13
Podsolik Merah Kuning		371,74					371,74
Podsolik Kelabu Coklat						16406,97	16406,97
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	2777,14		3908,56	7089,57		41889,59	55664,86
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol						2529,77	2529,77
Rendzina, Mediteran Merah Kuning			7738,87				7738,87
Jumlah	78236,81	49238,00	113784,01	51849,36	6152,89	117742,05	417003,12

Berdasarkan peta jenis tanah di APL terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Jenis tanah yang dominan di APL adalah dari jenis tanah mediterania merah kuning yang meliputi luas 97.345,13 ha, dengan luas wilayah terbesar terdapat pada wilayah Kabupaten Bone Bolango yang mencapai luasan 30.395,68. Jenis tanah lain yang bisa ditemukan di APL adalah tanah aluvial. Beberapa pakar mengemukakan, tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus

5. Kondisi Vegetasi di APL

a) Vegetasi alami

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, penyebaran vegetasi alam di wilayah APL vegetasi dataran rendah (*lowland*). Didataran rendah yang memiliki ketinggian < 1000 mdpl, vegetasi alami masih bisa ditemukan terutama pada wilayah berhutan yang berada di dalam APL. Meskipun luasanya sangat kecil tapi keberadaan vegetasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan kategori tutupan lahan, wilayah yang masih memiliki vegetasi alami tersebut merupakan wilayah hutan sekunder atau wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas Wilayah-wilayah yang masih berhutan dapat ditemukan di wilayah Kecamatan Taluditi, Kecamatan Popayato dan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Disamping ditemukan pada wilayah-wilayah perbatasan antara APL dan HPT, wilayah yang bervegetasi alami juga ditemukan pada wilayah-wilayah perbukitan dan pegunungan yang terjal. Namun demikian

sebagian besar vegetasi alami di APL telah mengalami gangguan karena sebagian besar telah berubah fungsi menjadi lahan-lahan pertanian tanaman semusim dan perkebunan. Karena itu, tumbuhan yang terdapat pada wilayah-wilayah seperti ini adalah merupakan tanaman budidaya. Walaupun demikian, beberapa jenis tumbuhan menggambarkan vegetasi alami. Komunitas vegetasi alami yang terdapat wilayah APL berupa semak belukar, rumput, alang-alang dan beberapa jenis pohon yang mempunyai diameter < 20 cm. Adapun vegetasi yang dominan dan paling sering ditemukan pada wilayah yang bervegetasi alami dapat dilihat pada tabel berikut

4.4.6 Kondisi Wilayah Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun , yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha. Subyek Hak Guna Usaha sesuai Pasal 30 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah : 1) Warga negara Indonesia, 2) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang Hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama (Pasal 28 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan Penetapan Pemerintah dan Konversi. Terjadinya Hak Guna Usaha karena Penetapan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 dan Pasal 37 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yakni berasal dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diberikan Pemerintah sebagai Hak Guna Usaha kepada yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedang terjadinya Hak Guna Usaha karena Konversi sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Konversi dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) antara lain ditentukan :

- 1) Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menjadi Hak Guna Usaha untuk sisa waktunya, selamanya 20 tahun ;
- 2) Hak-hak atas tanah seperti : Hak Agrarisch Eigendom, Hak Milik Adat, Hak Grant Sultan, Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikular dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik, sejak mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur lebih lanjut pada Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Pemberian Hak Guna Usaha tersebut wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan.

- 3) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai dengan ketentuan 22 Peraturan Perundang-undangan (Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikan (tersebut).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Penetapan terhadap hak guna usaha bisa dihapuskan jika

- 1) Jangka waktunya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian atau Perpanjangannya;
- 2) Dihentikan/dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, misalnya : tidak terpenuhinya dan/atau dilanggarnya kewajibankewajiban pemegang hak; adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir
- 4) Dicabut untuk kepentingan umum ;
- 5) Tanah diterlantarkan
- 6) Tanahnya musnah ;
- 7) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hak tersebut. Diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sebagaimana lahirnya Hak Guna Usaha dicatat dalam Buku tanah, maka hapusnya Hak Guna Usaha juga harus dicatat menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Dibandingkan dengan wilayah APL, maka penggunaan lahan di didalam HGU lebih statis karena peruntukkan untuk HGU umumnya untuk kepentingan perkebunan dan pertanian yang cenderung monokultur misalnya HGU perkebunan sawit, HGU kelapa dalam dan HGU perkebunan tebu. Pemanfaatan HGU biasanya dilakukan dengan melihat kondisi yang terdapat dalam HGU tersebut. Berdasarkan hasil analisis spasial luas HGU di Provinsi Gorontalo mencapai 240.913,88 ha atau 43,96% dari luas total APL. Wilayah administrasi yang mempunyai HGU terluas adalah Kabupaten Pohuwato dengan luas 104.886,68 ha

Tabel 22. Luas dan sebaran HGU di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten	Luas
1	Kabupaten Gorontalo	64.522,44
2	Kabupaten Boalemo	29.861,97
3	Kabupaten Pohuwato	104.886,68
4	Kabupaten Bone Bolango	26,04
5	Kabupaten Gorontalo Utara	41.616,55
6	Kota Gorontalo	-
Total		240.913,88

Sumber: Hasil Analisis Spasial 2013

Adapun kondisi dan situasi di dalam HGU yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Kondisi Iklim

Kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan arahan pemanfaatan kawasan/wilayah termasuk dalam pemanfaatan wilayah HGU. Dalam menentukan iklim, para ahli telah menetapkan beberapa klasifikasi iklim yang telah disepakati bersama. Klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan [iklim](#) yang

terdapat di bumi. Akibat perbedaan [latitudo](#) (posisi relatif terhadap [khatulistiwa](#), garis lintang), letak [geografi](#), dan kondisi [topografi](#), suatu tempat memiliki kekhasan iklim. Klasifikasi iklim biasanya terkait dengan [bioma](#) atau [provinsi floristik](#) karena iklim mempengaruhi [vegetasi](#) asli yang tumbuh di suatu kawasan.

Klasifikasi iklim yang paling umum dikenal adalah [klasifikasi Koeppen dan Geiger](#). Klasifikasi ini berlaku untuk seluruh dunia sehingga sering dirujuk untuk kajian-kajian [geologis](#) dan [ekologi](#). Beberapa negara mengembangkan klasifikasi iklim sendiri untuk mengatasi variasi iklim tempatan yang beragam. Indonesia, misalnya, lebih sering menggunakan sistem [klasifikasi Schmidt dan Ferguson](#) (SF), yang ternyata disukai untuk kajian-kajian [kehutanan](#) dan [pertanian](#). Sistem SF didasarkan pada klasifikasi yang terlebih dahulu disusun oleh Mohr, namun diperhalus kriterianya.

Klasifikasi ini sangat populer di Indonesia dan beberapa negara tetangga yang memiliki musim kering-musim hujan. Menyadari bahwa variasi iklim Indonesia sangat beragam, pemerintah Indonesia meminta kedua ahli tersebut untuk membuat suatu sistem klasifikasi yang cocok bagi keadaan Indonesia.

Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering (BK) ke bulan basah (BB), yang disimbolkan sebagai Q (dalam [persen](#)). Bulan kering adalah bulan dengan presipitasi total di bawah 60 [mm](#) dan bulan basah adalah bulan dengan presipitasi total di atas 100 mm. Delapan kelompok iklim menurut Schmidt dan Ferguson adalah

- Iklim A, $Q < 14,3$, daerah sangat basah, [hutan hujan tropis](#);
- Iklim B, $14,3 \leq Q < 33,3$, daerah basah, hutan hujan tropis;
- Iklim C, $33,3 \leq Q < 60,0$, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau);

- Iklim D, $60,0 \leq Q < 100,0$, daerah sedang, [hutan peluruh](#);
- Iklim E, $100,0 \leq Q < 167,0$, daerah agak kering, padang [sabana](#);
- Iklim F, $167,0 \leq Q < 300,0$, daerah kering, padang sabana;
- Iklim G, $300,0 \leq Q < 700,0$, daerah sangat kering, padang ilalang;
- Iklim H, $Q \geq 700,0$, daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman, secara umum iklim di HGU di Provinsi adalah Iklim E atau iklim agak kering dimana bulan kering lebih lama dibandingkan dengan bulan basah. Wilayah yang agak kering terletak pada wilayah sebelah selatan sampai dengan wilayah pesisir Teluk Tomini, sedangkan wilayah yang agak basah terletak pada bagian utara yang umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi. Wilayah bagian utara merupakan kawasan hutan tropis dataran rendah yang umumnya mempunyai curah hujan lebih tinggi.

Tabel 23. Klasifikasi iklim di HGU Provinsi Gorontalo

Nama Kabupaten	Luasan Tipe Iklim (Ha)				Jumlah
	C1	C2	E1	E2	
Boalemo	0,37	465,07	20972,55	8423,97	29861,97
Bone Bolango		26,04			26,04
Gorontalo	18214,37	46,37	32986,98	13274,70	64522,43
Gorontalo Utara	25937,32	14722,91	826,16		41486,38
Pohuwato	551,21	438,97	59106,14	44760,69	104857,02
Total	44703,28	15699,36	113891,84	66459,36	240753,84
Prosentase	18,57	6,52	47,31	27,60	100,00

Sumber: hasil analisis data spatial, 2013

2. Kelas lereng

Informasi kemiringan dan bentuk lereng dalam setiap wilayah termasuk wilayah HGU sangat penting bagi perencanaan pemanfaatan lahan. Kemiringan lapangan yang semakin besar

akan memperbesar terjadinya erosi karena tanah sangat mudah diangkut, yaitu mudah terbawa dalam bentuk suspensi hampir sempurna. Fenomena ini menyebabkan produktivitas lahan menurun. Lahan-lahan yang miring juga berpengaruh besar terhadap limpasan permukaan.

Berdasarkan hasil analisis spasial tingkat ketererengan di HGU sangat bervariasi mulai dari datar sampai dengan sangat curam. Wilayah datar di HGU meliputi luasan 150.546,82 ha atau 62,51% dari total seluruh kelas lereng. Wilayah administrasi yang memiliki luas wilayah yang datar terbesar adalah Kabupaten Pohuwato yaitu seluas 70.862,90 ha. Beberapa wilayah yang sangat curam juga terdapat di HGU meskipun luasannya tidak signifikan yaitu hanya 467,31 ha atau 0,19 %.

Tabel 24. Kelas Lereng HGU setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo

Nama Kabupaten	Luas Kelas Lereng (Ha)					Jumlah
	0 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Boalemo	21729,37	5955,49	2053,94	122,68		29861,48
Bone Bolango	26,04					26,04
Gorontalo	46133,51	11485,52	6094,20	809,21	46,37	64522,44
Gorontalo Utara	11795,00	11652,27	12743,64	5185,14	189,07	41376,04
Pohuwato	70862,90	23218,56	7981,91	2531,71	231,86	104595,07
Total	150546,82	52311,84	28873,69	8648,73	467,31	240381,08
Prosentase	62,51	21,72	11,99	3,59	0,19	100

Sumber: Hasil pengukuran spasial dan checking lapangan 2013

3. Kondisi penutupan lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan dipermukaan bumi yang terdiri dari beberapa ragam pemanfaatan lahan. Identifikasi, pemantauan, dan evaluasi tutupan lahan perlu selalu dilakukan pada setiap periode tertentu, karena ia dapat menjadi dasar untuk mengetahui perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian, identifikasi tutupan lahan menjadi bagian yang

Tabel 25. Luas Tutupan Lahan Setiap Kabupaten di HGU Provinsi Gorontalo

Tipe Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan Setiap Kabupaten (Ha)					Jumlah	%
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato		
Hutan Mangrove Primer	0,61					0,61	0,0003
Hutan Mangrove Sekunder	7,40			17,07		24,47	0,0102
Hutan Sekunder	5,06					5,06	0,0021
Pemukiman	25,02	0,51	7,50	145,37	84,54	262,94	0,1091
Perkebunan	3,78			81,79	633,11	718,69	0,2983
Pertanian Lahan Kering	29433,82	25,40	64476,07	40255,81	103643,68	237834,77	98,7219
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	251,76	0,11	38,87	910,98	452,66	1654,38	0,6867
Rawa					19,00	19,00	0,0079
Sawah		0,02		158,74		158,76	0,0659
Semak Belukar	130,94			46,80	53,89	231,62	0,0961
Tambak	3,58					3,58	0,0015
Total	29861,97	26,04	64522,44	41616,55	104886,87	240913,87	100

Sumber: Hasil perhitungan data spasial dan checking lapangan 2013

penting dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan terhadap lahan HGU bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Dalam hubungannya dengan optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan penggunaan lahan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tindakan yang sistematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan, serta tepat pada waktunya, untuk peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana usaha atau campur tangan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Data penggunaan/tutupan lahan ini dapat disadap dari foto udara/citra satelit. Teknik interpretasi citra satelit termasuk di dalam sistem penginderaan jauh. Berdasarkan hasil analisis spasial kondisi tutupan lahan di HGU didominasi oleh tipe tutupan lahan pertanian lahan kering dengan luas 237.834,77 ha atau 98,72%. Adapun luasan dan sebaran tutupan lahan HGU di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 25.

4. Kondisi jenis tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan.

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dibantu oleh organisme membentuk tekstur unik yang menutupi permukaan bumi. proses pembentukan tanah ini akan membentuk lapisan-lapisan yang menutupi seluruh permukaan bumi. lapisan-lapisan yang terbentuk memiliki tekstur yang berbeda dan setiap lapisan juga akan mencerminkan proses-proses fisika, kimia dan biologi yang telah terjadi selama proses pembentukannya. Hans Jenny (1899-1992), seorang pakar tanah asal Swiss yang bekerja di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi/pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme (termasuk manusia), dan relief permukaan bumi (topografi) seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut terbentuklah berbagai jenis tanah dan dapat dilakukan klasifikasi tanah. Berdasarkan hasil analisis spasial di wilayah HGU terdapat beberapa jenis tanah. Pembentukan jenis tanah di HGU juga sangat dipengaruhi oleh iklim, bahan induk Jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah Aluvial hidromorf dengan luas penyebaran mencapai 233446,02 ha atau 98,53. Jenis tanah ini paling banyak dijumpai di Kabupaten Pohuwato dengan luas 102.180,33 ha. Adapun penyebaran jenis tanah di seluruh wilayah HGU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Jenis Tanah setiap Kabupaten di HGU Provinsi Gorontalo

Jenis Tanah	Luas Jenis Tanah Setiap Kabupaten (Ha)					Jumlah	%
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato		
Aluvial Hodromorf,Glei Humus	29396,90		64476,07	37392,73	102180,33	233446,02	98,53
Aluvial,Aluvial,Aluvial					287,10	287,10	0,12
Brown Forest Soil,Aluvial,Aluvial Hidromorf					320,08	320,08	0,14
Latosol, Latosol				461,63		461,63	0,19
Latosol, Latosol, Latosol	434,38				46,58	480,96	0,20
Mediteran Merah Kuning, Latosol		1,22		556,82		558,04	0,24
Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning			46,37	664,50		710,87	0,30
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	30,69				638,51	669,19	0,28
Grand Total	29861,97	1,22	64522,44	39075,67	103472,60	236933,89	100

Sumber: Hasil analisis spasial 2013

5. Kondisi Vegetasi di HGU

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terlihat, tipe vegetasi di HGU lebih didominasi oleh tipe vegetasi budidaya. Hal ini disebabkan karena umumnya HGU yang dikuasai oleh masyarakat telah berubah menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat

mengusahakan lahan-lahan pertanian dalam skala kecil yaitu dengan luasan 0,5 – 2 ha. Beberapa lahan HGU yang dikuasai oleh masyarakat bahkan ditelantarkan dan ditumbuhi oleh alang-alang/semak. Beberapa tumbuhan berkayu yang tumbuh dilahan-lahan masyarakat juga ditemukan di HGU. Tanaman berkayu ini sengaja ditanam oleh masyarakat, disamping sebagai tanaman peneduh juga dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber pangan. Adapun beberapa jenis tanaman yang sering diusahakan oleh masyarakat di wilayah HGU dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 27. Komposisi Vegetasi budidaya di lokasi HGU

No	Nama Indonesia	Nama lokal	Nama Ilmiah
1	Alpukat	Alpukat	<i>Persea gratisima</i>
2	Daun bawang	Daun bawang	<i>Allium fistulosum</i>
3	Bayam merah	Bayam	<i>Alternanthera amoena</i>
4	Damar	Damahu	<i>Agathis</i>
5	Kacang hijau	Kacang ijo	<i>Phaseolus radiatus</i>
6	Kacang tanah	Kaca	<i>Arachis hypogea</i>
7	Kangkung	Kanto	<i>Ipomea aquatica</i>
8	Ubi Kayu	Kasubi	<i>Ipomea batatas</i>
9	Padi ladang	Padi	<i>Oriza sativa</i>
10	Rambutan	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>
11	Terong	Poki-Poki	<i>Solanum melongena</i>
12	Asam	Asam jawa	<i>Tamarindus indica</i>
13	Bambu	Talilo	<i>Bambusa spp</i>
14	Belimbing	Lembetu'e	<i>Averhoa bilimbi</i>
15	Cabe	Malita	<i>Capsicum anuum</i>
16	Coklat	Sakulati	<i>Theobroma cacao</i>
17	Durian	Durian	<i>Durio zibetinus</i>
18	Enau	Waolo	<i>Arenga pinnata</i>
19	Jagung	Binthe	<i>Zea mays</i>
20	Jambu biji	Dambu	<i>Psidium guajava</i>
21	Jambu air	Upo huala	<i>Syzigium malacense</i>

Lanjutan Tabel 27

No	Nama Indonesia	Nama lokal	Nama Ilmiah
22	Jeruk	Limu	<i>Citrus maxima merr</i>
23	Jati	Jati	<i>Tectona grandis</i>
24	Kapok	Duyungo	<i>Ceiba petandra</i>
25	Kelapa	Bongo	<i>Cocos nucifera</i>
26	Mangga	Oile	<i>Mangifera indica</i>
27	Mente	Buah yakis	<i>Anacardium heterophyllum</i>
28	Nangka	Langge	<i>Artocarpus heterophyllum</i>
29	Nenas	Nanati	<i>Ananas cosmosusu</i>
30	Pepaya	Pepaya	<i>Carica papaya</i>
31	Pisang	Lambi	<i>Musa Paradisiaca</i>
32	Serei	Timbuale	<i>Cymbopogon nardus</i>
33	Tomat	Tamate	<i>Solanum melongena</i>

Sumber: Hasil survey lapangan, 2014

4.4.6 Pemanfaatan APL dan HGU untuk Perkebunan

1. Perkebunan Kelapa Sawit

Hadirnya perkebunan kelapa sawit di puluhan kecamatan di Provinsi Gorontalo diharapkan memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitarnya. Kecamatan-kecamatan yang dulunya sepi, akan berkembang setelah hadirnya perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan juga akan mengalami pergerakan sangat positif. Kegiatan di sektor perkebunan yang perkembangannya cukup pesat saat ini merupakan salah satu bidang agroindustri yang mengembangkan komoditi perkebunan untuk menunjang sektor industri, dan salah satu yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2010, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 6,7 juta ha meliputi perkebunan besar dan rakyat,

dengan produksi 10,4 juta ton minyak kelapa sawit (*crude oil palm*) dan pada tahun 2011 mencapai 12,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri.

Tabel 28. Nama-nama perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Gorontalo

Nama Perusahaan	Wilayah Administrasi				Total
	Boalemo	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	
PT. Agro Artha Surya	20184,99	9,29			20194,27
PT. Agro Palma Katulistiwa		20870,80			20870,80
PT. Banyan Tumbuh Lestari				15917,53	15917,53
PT. Heksa Jaya Abadi		22773,08			22773,08
PT. Inti Global Laksana				11990,27	11990,27
PT. Sawindo Cemerlang				18857,42	18857,42
PT. Sawit Tiara Nusa				9255,16	9255,16
PT. Sino Taro Indah		0,08	15393,15		15393,23
PT. Tri Palma Nusantara	17,54	20530,38			20547,92
PT. Umekah Makmur		0,46	25392,36		25392,83
PT. Wira Mas Permai				40530,03	40530,03
PT. Wira Sawit Mandiri				7897,50	7897,50
Grand Total	20202,53	64184,08	40785,52	104447,92	229620,05

Sumber: Hasil analisis data utama, 2013

Berdasarkan data diatas perusahaan kelapa sawit yang akan beroperasi maupun yang telah melakukan kegiatan menguasai lahan dengan total 229.620,05 ha yang tersebar di empat kabupaten. Luasan perkebunan sawit terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato mencapai 104.447,92 ha. Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Pohuwato yang akan beroperasi maupun sedang melakukan kegiatan adalah PT Banyan Tumbuh Lestari seluas 15917,53 ha, PT Inti

Global Laksana seluas 11.990,27, PT Sawindo Cemerlang seluas 18.857,42 ha, PT. Sawit Tiara Nusa seluas 9255,16 ha, PT Wira Mas Permai seluas 40.530,03, PT Wira Sawit Mandiri. Sebaran perkebunan sawit dapat dilihat pada lampiran akhir dokumen ini

2. Perkebunan Tebu

Tebu merupakan tanaman sumber pemanis alami. Tanaman ini berasal dari wilayah sub tropis, dapat tumbuh pada semua jenis tanah dengan ketinggian mulai dari 0 – 1400 mdpl. Di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo tanaman tebu memiliki fungsi ganda yakni bernilai ekonomi tinggi sekaligus pelestari lingkungan, karena tanaman tebu bisa digunakan sebagai pengendali erosi yang disebabkan oleh air. Kebutuhan gula di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun dan belum mampu dipenuhi hingga saat ini. Luas areal tanaman tebu di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 436.500 ha dengan produksi gula nasional sebesar 2.668.427 ton. Tebu tidak saja menghasilkan gula putih tetapi juga menghasilkan limbah yang bermanfaat untuk bahan bakar nabati. Pada tahun 2010 dari limbah tebu yang dihasilkan energi listrik sebesar 1,97 juta Kwh dan diperkirakan akan meningkat 2,75 juta Kwh ditahun 2025. Terkait dengan pelestarian lingkungan tebu bisa menyerap CO₂ sebesar 9,56 juta ton pada tahun 2010 dan akan meningkat sebesar 13,9 juta ton.

Saat ini di Provinsi Gorontalo terdapat perkebunan tebu yang dimiliki oleh PG Rajawali yang sebelumnya bernama PT. Naga Manis Plantation. Total luas perkebunan tebu adalah 16.194,7 ha yang tersebar di dua wilayah yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 29. Luas perkebunan tebu

No	Nama Kabupaten	Luas (ha)
1	Kabupaten Boalemo	10083,88
2	Kabupaten Gorontalo	6110,82
	Total	16194,7

Sumber: hasil pengukuran dan analisis spatial 2013

Berdasarkan data diatas luas perkebunan terbesar berada di Kabupaten Boalemo dimana luasannya mencapai 10.083,88 ha. Di Kabupaten Boalemo luas perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Paguyaman yang mencapai 5.274,87 ha sedangkan di wilayah Kabupaten Gorontalo, luas perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Tolangohula dimana luasannya mencapai 3107,41 ha. Perkebunan tebu di Provinsi Gorontalo telah dimulai sejak tahun 1980-an dan setiap tahun luas perkebunan PG Rajawali terus bertambah. Sebaran perkebunan tebu milik PT. PG Rajawali dapat dilihat di bawah ini

3. Perkebunan kelapa dalam

Data Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2012 menunjukkan, luas areal perkebunan di Provinsi Gorontalo \pm 360.376 ha yang sudah dimanfaatkan 247.195,49 ha sedangkan yang belum dimanfaatkan mencapai 113.180,51 ha. Pemanfaatan yang terbesar adalah untuk izin perkebunan kelapa sawit, sedangkan perkebunan tebu dan perkebunan kelapa dalam menduduki peringkat ke-2 dan ke-3. Meskipun perkebunan kelapa dalam memiliki luas yang lebih kecil, tapi masyarakat telah lebih dulu mengenal kelapa dalam dibandingkan dengan sawit dan tebu. Sejak puluhan tahun yang lalu, Gorontalo merupakan penghasil kopra terbesar di Sulawesi Utara.

Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi luas tanam maupun produksi. Antara tahun 2007 sampai dengan 2012 produksi tanaman kelapa mencapai 62.338 ton. Meningkatnya produktivitas kelapa salah satunya ditunjang oleh lahan-lahan HGU perkebunan kelapa yang tersebar hampir diseluruh Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, total luas lahan HGU untuk perkebunan kelapa mencapai 1380,70 ha. Adapun luas HGU perkebunan kelapa di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 30. Pemilik HGU individu di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Nama Pemilik HGU	Wilayah Administrasi			Jumlah
		Anggrek	Kwandang	Sumalata	
1	Hi. Saleh Abd Alamri			185,09	185,09
2	Husein Alamri			109,08	109,08
3	I. Salindehe	51,10			51,10
4	Joytje Nento		38,51		38,51
Total		51,10	38,51	294,17	383,78

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 31. Pemilik HGU di Kabupaten Bone Bolango

No	Pemilik HGU	Kecamatan	Luas (Ha)
1	PT. Miwon/Keluarga Habibie	Tilongkabila	26,04

Tabel 32. Pemilik HGU individu di Kabupaten Pohuwato

No	Nama Pemilik HGU	Marisa	Paguat	Popayato	Jumlah
1	Drs.Erwin Giasi			260,44	260,44
2	Fitri I.D. Albahar		72,86		72,86
3	Ny. Helly Waworuntu			113,66	113,66
4	Tui Gesai	86,74			86,74
	Total	86,74	72,86	374,10	533,7

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 33. Pemilik HGU individu di Kabupaten Boalemo

No	Nama Pemilik HGU	Paguyaman	Tilamuta	Jumlah
1	Pemda Kab Gorontalo	142,67		142,67
2	Sintje Ranty S.H.		26,65	26,66
	Total	142,67	26,65	169,32

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

4.4.7 Pemanfaatan kawasan wisata

Dalam kebijakan pembangunan nasional dijelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk menggalakkan perekonomian Nasional dan Daerah. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun lalu, terutama sebelum krisis moneter melanda perekonomian Indonesia, kegiatan kepariwisataan memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian Nasional yang salah satu pendorongnya ialah globalisasi diberbagai sektor.

Hal ini memberikan arti bahwa penggalakan kegiatan kepariwisataan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Peran serta pihak swasta dan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam iklim kompetisi yang sehat dan didasari dengan komitmen saling menguntungkan serta saling menghidupi.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar yang tersebar di enam kabupaten/kota. Kekuatan pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo terletak pada atraksi yang ditawarkan yang meliputi: wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah. Berdasarkan hasil survey terdapat kurang lebih 85 potensi wisata yang memiliki atraksi menarik. Namun demikian belum semua potensi tersebut dikembangkan. Salah satu kendala utama pengembangan pariwisata adalah kurangnya infrastruktur yang menunjang kegiatan wisata. Beberapa potensi pariwisata yang cukup dikenal antara lain: wisata bahari seperti: wisata pantai Dunu, Wisata Pantai Botutonuo, Wisata Pantai Minanga, Wisata Pantai Bolihutuo, sedangkan wisata alam antara pemandian air panas Lombongo. Untuk wisata sejarah seperti benteng otanaha dan benteng orange.

4.4.8 Pemanfaatan sumber energi terbarukan

Pemanfaatan energi terbarukan menjadi semakin penting mengingat semakin terbatasnya sumber energi fosil atau non-terbarukan. Melalui Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah telah berupaya untuk menyusun strategi pengelolaan energi nasional 2006-2025, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam pasokan energi nasional harus dipenuhi 17% energi terbarukan. Selain itu melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Indonesia berkeinginan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan kapasitas iptek

dengan prinsip-prinsip green economy development. Ini menyatakan dengan jelas bagaimana peran energi terbarukan di masa yang akan datang

Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan penataan dan pengembangan kawasan strategis serta pengembangan infrastruktur melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo – Paguyaman – Kawandang atau KEK Gopandang sebagai upaya mendukung optimalisasi MP3EI. “Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan energi yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah diantaranya yaitu finalisasi pembangunan PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek, pengembangan potensi energi terbarukan untuk mendukung industrialisasi, meliputi pengembangan geothermal, *biomassa energy* dan pembangunan Waduk Dumbaya Bulan. Untuk kapasitas yang lebih kecil pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah membangun beberapa PLTMH seperti PLTMH Ayumolingo di Kabupaten Boalemo, PLTMH Dulamayo di Kabupaten Gorontalo dan PLTMH Bulontio di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan total potensi energi sumberdaya air untuk memenuhi pasokan listrik adalah 65.4 MW (Mega Watt) dan potensi panas bumi 110 MW. Total Potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175.4 MW dan yang baru termanfaatkan sebesar 3.5 MW. Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamogabu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430.69 MW dan perkiraan beban puncak 266.40 MW.

Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini 86.56 MW dan daya mampu 59.20 MW dengan beban puncak 56.13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129.270 pelanggan dengan tingkat pelanggaran terbesar sektor rumah tangga sebesar 92.46 %. Pertumbuhan rata – rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8.6 s/d 10 %. Ratio

elektrifikasi saat ini sebesar 69.97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah.

4.4.9 Izin Usaha Pertambangan

Potensi pertambangan di Provinsi Gorontalo cukup beragam dan tersebar di beberapa wilayah. Salah satu bahan tambang yang menonjol adalah emas disamping terdapat pula beberapa bahan galian yang juga bernilai di antaranya Granit, batu gamping dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelusuran IUP, terdapat 22 perusahaan pertambangan yang mempunyai izin konsesi. Saat ini belum satu pun dari 22 perusahaan pertambangan tersebut yang melakukan aktivitas eksploitasi. Semuanya masih dalam taraf izin eksplorasi bahkan beberapa perusahaan baru akan mengurus izin lokasi. Terdapat dua perusahaan pertambangan memegang izin kontrak karya dan sisanya memegang IUP. Kontrak karya adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan izin usaha pertambangan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Adapun perusahaan pemegang kontrak karya tersebut adalah PT Gorontalo Sejahtera Mining di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo, PT Gorontalo Minerals di Kabupaten Bone Bolango. Total luasan hak konsesi pertambangan di Provinsi Gorontalo mencapai 301833,87 ha, dimana Kabupaten Gorontalo mempunyai luas hak konsesi paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Luas konsesi pertambangan di Kabupaten Gorontalo adalah 84769,13 ha.

Tabel 34. Nama perusahaan pemegang IUP dan Kontrak Karya di Provinsi Gorontalo

Nama Pemegang IUP	Wilayah Administrasi					Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	
CV. Damai				6179,44		6179,44
KUD Dharma Tani					94,65	94,65
PT. Alam Jaya Energi			5537,22			5537,22
PT. Berati Bina Mineral			999,15			999,15
PT. Cahaya Ranca Mas					16993,21	17090,23
PT. Cemerlang Gemilang Terbilang					14272,86	14272,86
PT. Eksplorasi Indonesia Jaya		12082,00	9414,49	55,60		21552,09
PT. Gorontalo Mineral's		37607,50				43810,69
PT. Gorontalo Sejahtera Mining	43,69		5408,08		7326,14	12777,92
PT. Indonesia Bina Mineral	5008,50		14322,11			19353,54
PT. Lion Power Energi					11409,96	11409,96
PT. Liquindo Persada		4136,36				4136,36
PT. Makale Toraja Mining			2,35	20895,89		21832,77
PT. Pertambangan Bumi Indonesia			38006,31	15104,84		54502,63
PT. Rasmanik Tonal Mineral	1012,62					1012,62
PT. Rimbunan Nusantara Abadi					21898,06	21898,06
PT. Suma Heksa Luban Abadi		251,47		5294,73		5546,20
PT. Suma Heksa Sinergi	0,05			9561,27	8232,56	17793,88
PT. Sumagud Sapta Sinar				4458,03		4969,64
PT. Tansri Masjid Energi			5148,41	546,88		5695,29
PT. Tilongkabila Nusantara Indo		5094,03				5094,03
PT. Totopo Jaya Mineral			5931,02			6274,64

Sumber: hasil analisis data utama

Bab V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil deskripsi penelitian di atas dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo masih memiliki areal perkebunan seluas 360.376 ha, yang sudah dimanfaatkan seluas 118.063 ha sehingga masih terbuka peluang inventasi di sektor perkebunan seluas 242.313 ha. Namun kendala di lapangan tanah tersebut tidak merupakan suatu hamparan dengan struktur tanah umumnya yang agak berbukit. Komoditas perkebunan yang dominan adalah Kelapa dengan luas areal 68.248 ha, Kakao 12.483 ha, Cengkeh 8.280 ha dan tebu **7.818** ha. Potensi perkebunan tersebut berpotensi pengembangannya dapat diintegrasikan dengan pengembangan peternakan khususnya peternakan sapi.
2. Di bidang perikanan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi tangkapan yang didasarkan atas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun. Potensi tersebut belum maksimal dimanfaatkan (baru sekitar 15 %), dan untuk itu masih terbuka investasi baik dalam penangkapan maupun budidaya.
3. Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi untuk pengembangan kelistrikan yang bersumber dari energy terbarukan yaitu potensi geothermal (panas bumi) daerah Suwawa sebesar 110 MW dan Pentadio Resort sebesar 20 MW. Selain daripada itu potensi geothermal lainnya relative kecil yang tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperatur 50⁰C, Kecamatan Botumoito dengan temperatur 42⁰C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperatur 62⁰C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65⁰C. dengan total sumber daya

diperkirakan sebesar 160⁰ (MW). Selain potensi geothermal Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi kelistrikan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan sumber potensi Sungai yang besar dan kecil di Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara. Sumber potensi listrik lainnya adalah Listrik Biomass yang bersumber dari pemanfaatan tongkol jagung, sekam padi, sampah dan tanaman lamtoro gung yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

4. Kawasan Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Gorontalo seluas 429.568 ha dimana sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian lahan kering campur semak dengan luasan 140.321 ha, Untuk lahan sawah, luas tutupan lahannya mencapai 32.775,61 ha, pertanian lahan kering seluas 82.690,53 ha, persawahan 32775,61 ha, semak belukar 48.386,45. Dari data tersebut masih terdapat lahan APL yang masih bisa digunakan untuk investasi khususnya lahan APL yang tidak dimanfaatkan tapi ditutupi oleh semak belukar.
5. Luas HGU di Provinsi Gorontalo mencapai 240.913,88 ha atau 43,96% dari luas total APL. Wilayah administrasi yang mempunyai HGU terluas adalah Kabupaten Pohuwato dengan luas 104.886,68 ha. Adapun pemanfaatan HGU sesuai izin yang sudah diproses untuk perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada 12 perusahaan seluas 229.620 ha, perkebunan tebu 16.194,7 dan perkebunan kelapa dalam seluas 1.113,2 ha.

5.2 Saran-saran

Dari hasil yang dikemukakan di atas, maka disarankan:

1. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) dapat lebih gencar mempromosikan peluang investasi baik Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Kehutanan dengan melakukan koordinasi lebih intensif dan Kabupaten/Kota.

2. Perlu diciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengefisienkan perizinan usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan perizinan baik yang sudah jalan apakah sesuai dengan izin yang sudah diberikan maupun izin yang sudah keluar tapi tidak dimanfaatkan disarankan untuk segera dicabut.

Daftar Pustaka

Budiharsono, Sugeng, 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori, Model Perencanaan, dan Penerapannya*.

Tambunan, Tulus 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad (2002). *Analisis Spasial dan Regional. Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN Yogyakarta.

Murad Rusmadi (2013). *Administrasi Pertanahan*, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Olilingo, Fachrudin Zain (2002). *Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Wilayah Dan Dampaknya terhadap Distribusi Pemakaian Input dan Ketimpangan Antar Sektor Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Syafrizal (2012). *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Bank Indonesia (2013) *Laporan Perkembangan Ekonomi Gorontalo*, BI Gorontalo.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2013). *Hak-Hak Atas Tanah*, Penerbit Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.

Kepres No. 34 Tahun 1992. *Pemanfaatan Tanah Hak Guna Tanah dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Ragka Penanaman Modal Asing*.

Laporan BPS Provinsi Gorontalo, 2013.

Peraturan Pemerintah no. 40 (1996). *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.

Lampiran 1 :**Biodata Ketua Tim Pengabdian/Pelaksana****IDENTITAS DIRI**

Nama : Dr. Fachrudin Zain Olilingo, SE.,MSI
NIP/NIDN : 195810281986031003/0028105805
Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IVd/Pembina Utama Madya
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
TMT sebagai Dosen : 5 Agustus 1986
Status Dosen : Tetap Tidak Tetap
Pendidikan Tertinggi : S3
Fakultas : Ekonomi
Prodi/Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Alamat kantor :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah : Jl. Gelatik 55 B Kota Gorontalo
Telp./Faks. : -
Alamat e-mail yg aktif : Fachrudin.olilingo@yahoo.com
No. HP : 081244200234
Alamat Facebook :
Alamat blog/homepage/web:

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi	Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi
1984	Sarjana Ekonomi	UNHAS	Ekonomi/Studi Pembangunan	Peranan Pelabuhan Udara Hasanuddin Mandai Terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan.
1995	Magister Ekonomi	UNPAD	Ekonomi/Studi Pembangunan	Analisis Tentang Hubungan Pendapatan Dengan Tabungan Anggota Koperasi (Studi Kasus Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara.
2002	Doktor Ekonomi	UNPAD	Ekonomi/Studi Pembangunan	Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian wilayah Dan Dampaknya Terhadap Distribusi Pemakaian Input Dan Ketimpangan Antar Sektor Di Provinsi Sulawesi Tengah.

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Ekonomi Mikro	S1	Studi Pembangunan/Untad/UNG	

Ekonomi Mikro	S1	Studi Pembangunan/Untad/UNG	
Ekonomi Makro	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Moneter	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Internasional	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Transport	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Publik	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Industri	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Pembangunan	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Koperasi	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Statistik	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Matematika Ekonomi	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Sejarah Pemikiran Ek	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Perekonomian Indonesia	S1	Studi Pembangunan/Untad	
Ekonomi Mikro	S2	Program Pascasarjana/Untad	

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2000	Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Wilayah Sulawesi Tengah Melalui Analisis Input-Output Tahun 1990 dan 1995.	Ketua	Dana Rutin Universitas Tadulako SK No. 3227/528/PL/1999

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2001	Derajat Ketergantungan Ekspor Dan Pengganda Ekspor Terhadap Output Sektor Ekonomi di Sulawesi Tengah: Input Output Tahun 1990 dan 1995	Forsimapas Bandung
Cat. Fotocopy/soft-file Abstrak atau Naskah lengkap mohon dilampirkan/diserahkan ke BPMA		

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta /Pembicara
2012	Kongres ISEI XVIII	ISEI Pusat	Nasional	Peserta
2012	Seminar Pengelolaan Energi Dan Desentralisasi Fiskal	ISEI Pusat	Nasional	Peserta
2012	Seminar On Agribusiness Of Maize-Livestock Integration	BPPP dan Pemprov Gtlo	Internasional	Panitia/Peserta
2013	Seminar Sustainable Development Throught CoconutSector	UNG	Internasional	Panitia/Peserta
2013	Seminar Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia	MAI dan Pemprov Gtlo	Nasional	Panitia/Peserta

